



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI,  
DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI DKI  
JAKARTA TAHUN 2024**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI, MEMERIKSA  
DAN MENGESAHKAN ALAT BUKTI TAMBAHAN**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 30 MEI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024
- Pemohon: Partai Demokrat

**TERMOHON**

KPU Republik Indonesia

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan

**Kamis, 30 Mei 2024, Pukul 13.30 – 15.45 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat     | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman       | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Intan Permata Putri

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Mehbob
2. Rahmat

**B. Ahli Pemohon:**

I Gusti Putu Artha

**C. Saksi Pemohon:**

1. Achmad Risky Fadillah
2. Prihita Handoko
3. Usman
4. Firmansyah

**D. Kuasa Hukum Termohon:**

Stefanus Budiman

**E. Ahli Termohon:**

Ibnu Sina Chandranegara

**F. Saksi Termohon:**

1. M. Arfah Madrianta
2. Sudirman
3. Abie Maharullah Madugiri
4. Dody Wijaya
5. Sudirman

**G. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

1. Hema Anggiat M. Simanjuntak
2. Eric Manurung

**H. Saksi Pihak Terkait:**

1. Sahir Kaimudin
2. R. Suci Lestari M
3. Lis Miani
4. Sinta Permanasari
5. Saripudin

## I. Bawaslu:

1. Sakhroji
2. Reki Putera Jaya

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB****1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, kita mulai.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Sidang dalam Perkara Nomor 09-01-14 dan 11 PHPU Tahun 2024, Pemohonnya Partai Demokrat, Pihak Terkait Partai NasDem.

Dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Kehadiran Para Pihak, tidak perlu dicek kembali karena sudah dicek. Kita agendanya adalah pembuktian, ya. Dalam pembuktian, kita akan mendengarkan Saksi dan Ahli. Tapi sebelumnya, apakah ada bukti tambahan dari Pemohon?

Ada, enggak?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MEHBOB [01:08]**

Tidak ada, Yang Majelis.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09]**

Tidak, ada.

Dari Termohon, ada bukti tambahan?

**4. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:13]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14]**

Sudah tidak ada?

**6. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:15]**

Ya.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15]**

Pihak Terkait, ada bukti tambahan?

**8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [01:18]**

Baik. Ada satu bukti tambahan, Majelis.  
Sudah sedang proses.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22]**

Sudah diserahkan.

**10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [01:22]**

Sedang proses diserahkan oleh rekan kami yang (...)

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25]**

Oke.  
Baik, ini sebelum sidang selesai nanti harus disahkan.  
Sekarang di mana? Di proses di mana?

**12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [01:30]**

Baik.  
Sekarang lagi di bawah, Yang Mulia.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33]**

Eenggak diserahkan di sini, tidak apa-apa disidang.

**14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [01:36]**

Baik. Kami akan segera hubungi, Yang Mulia.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38]**

Ya, dihubungi suruh diserahkan di sini asal sudah ada legesnya,  
ya.

**16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [01:43]**

Baik. Baik, Yang Mulia.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44]**

Baik, kita mulai.

Ini kita bertiga menjelajah ini, ya. Dari Papua, kemudian ke Aceh, terus Sumatera Selatan, ke utara sekarang kembali ke Ibu Kota ini. Jadi menjelajah sudah keliling Indonesia, Pak Putu Artha juga menjelajah ini, cari uang di Jakarta.

Baik. Kita akan mendengarkan Saksi dan Ahli. Sebelumnya ada dua Ahli. Ahli Pemohon Pak Gusti Putu Artha dan Termohon Prof Dr. Ib ... Ibnu Sina Chandrawinata[sic!] dari Pemohon ... dari Termohon.

Silakan, ke ... maju dulu untuk diambil sumpahnya. Ini Ahli didahulukan supaya bisa segera setelah menyampaikan keahliannya bisa meninggalkan ruang sidang. Kalau kita tahan di sini berlama-lama, ongkosnya mahal. Kasihan Termohon dan Pihak Terkait yang mendatang, Pihak Pemohon harus bayar mahal ini.

Kelihatan kan kalau Ahli bajunya bagus-bagus kan? Karena memang biayanya mahal ini.

Saya perkenankan, Yang Mulia Prof. Anwar, untuk mengambil sumpah.

**18. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [03:24]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, Pak Putu dulu, ya.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:27]**

Ya.

**20. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [03:28]**

Sesuai dengan ini urutan Ahli dari Pemohon. Sumpahnya sama seperti tadi, ya.

Mohon ikuti saya.

"Om atah parama wisesa. Saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Om shanti shanti shanti om."

**21. AHLI BERAGAMA HINDU DISUMPAH [03:46]**

Om atah parama wisesa. Saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Om shanti shanti shanti om.

**22. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [04:11]**

Ya. Lanjut untuk, Pak Prof. Ibnu Sina. Mohon ikuti saya, ya.  
 "Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**23. AHLI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH [04:26]**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**24. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [04:44]**

Ya, terima kasih.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:46]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Anwar. Kembali ke tempat Ahli. Terima kasih, pendamping Ahli dalam sumpah.  
 Pak Putu Artha, ada waktu 7 ... sekitar 10 menit untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya, nanti setelah itu bisa ada tanya jawab. Silakan.

**26. AHLI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [05:10]**

Terima kasih, Majelis. Assalamualaikum wr. wb.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:15]**

Walaikumussalam.

**28. AHLI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [05:16]**

Om Swastiastu. Saya sudah memberikan paparan secara tertulis, tapi saya akan mencoba untuk 10 menit, saya lisankan saja, agar lebih fokus dengan persoalan kita.

Majelis dan hadirin yang terhormat, konstruksi bangunan pemilu kita yang kita pahami hari ini itu sebetulnya sangat kuat, landasannya itu, ada namanya asas, langsung umum, bebas, jujur, dan adil. Dan ada namanya prinsip, 12 prinsip dasar mulai dari berkepastian hukum sampai efektif, semua itu menjadi satu fondasi untuk ... apa ... proses penyelenggaraan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Turun ke bawah kemudian, bagaimana menerjemahkan ini dalam salah satu



tahapan, yang namanya rekapitulasi berjenjang, mulai dari TPS sampai tingkat nasional, maka turunlah peraturan KPU yang kita kenal sekarang ini, yang menjadi dasar dari produk hukum kita dalam proses penyelenggaraan pemilu, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2023.

Majelis yang terhormat, sebetulnya konstruksi rekapitulasi nasional kita pemilu saat ini, jauh lebih bagus dibandingkan dengan 2019 dan 2014.

Saya melihat ada 3 elemen pokok di situ, pertama misalnya peraturan KPU kita sekarang ini sangat rigid mengatur. Mau formulir, proses tahapan, dan seterusnya, jauh lebih bagus daripada 2019-2014.

Yang kedua, yang paling prinsip hari ini, kita menggunakan basis perhitungan itu dulu namanya C-1 Plano sekarang namanya C.Hasil. Kalau 2019 kita menggunakan C-1 Salinan itu, yang kita sebut sekarang C.Salinan yang lebih kecil itu. Tapi sekarang, seluruh produk hukum kita berkaitan dengan proses rekapitulasi, menggunakan dalam bahasa dulu C-1 Plano sekarang namanya C.Hasil. Artinya ini progres yang sangat bagus, karena dulu terjadi manipulasi misalnya di C.Salinan, kemudian langsung data autentiknya yang dipakai.

Nah kemudian yang ketiga, yang juga berubah adalah terakhir pada tahun 2009 di era saya, proses rekapitulasi itu ada ketentuan begini. Kalau misalnya ada persoalan di atas, hanya boleh membuka satu jenjang di bawahnya. Tapi sekarang tidak ada, makanya kemudian ketika terakhir saya jadi saksi nasional bahkan, sampai di TPS pun dibuka oleh KPU nasional. Karena mereka punya tanggung jawab untuk menuntaskan, sebegitu sebetulnya bagusnya konstruksi teknis regulasi kita sekarang ini, tetapi toh, kemudian kita bersidang disini ada masalah. Ada 2 masalah yang kita coba, baca dari persoalan ini.

Pertama karena mereka berbeda angka, berarti ada persoalan selisih hasil. Selisih hasil itu terjadi karena kemudian ketika dalamnya adalah, apa, persoalan prosedural. Nah, Saya mencoba mem ... membaca dalam potret normatif di pas ... peraturan KPU yang saya sebutkan tadi. Pasal 10 sampai Pasal 25 diatur betul bagaimana tata cara urutan rekapitulasi di tingkat TPS sampai kemudian di level kecamatan.

Yang singkat ceritanya adalah dan ini tidak terjadi di kasus ini, ketika kemudian rekapitulasi di TPS, sederhananya buka Sirekap, buka foto C.Hasil, buka kotak, tempelkan C.Hasil di ... apa namanya ... di papan, cocokkan, kalau tidak cocok, gunakan yang ada di kotak sebagai dasar untuk memperbaiki yang ada di foto. Kalau belum ada fotonya, foto oleh KPPS atau PPS untuk ditayangkan di Sirekap.

Nah, kemudian saksi punya C.Salinan cross-check. Hampir di semua kasus yang kita alami sekarang ini bersidang di sini tidak ada masalah. Ketika head to head antara C.Hasil salinan tidak ada masalah. Yang kemudian bersidang hari ini di semua kasus adalah begitu menjumlahkan, ini dia, begitu menjumlahkan antara C.Hasil berbasis TPS tadi itu menjadi angka total, muncullah masalah.

Lho, punya saya 1.000 kok jadi 900 berkurang 100? Hampir semua kasus yang kita tangani hari ini, locus-nya begitu. Terjadi di PPK, soal D.Kecamatan. Kenapa D.Kecamatan? Saya ingin menjelaskan pengalaman saya. Dulu ketika masyarakat rekapitulasi di tingkat PPS, masalahnya di PPS. Mohon maaf bahasa saya agak kasar, karena malingnya di PPS itu. Kalau sekarang kejadiannya di kecamatan, maka hampir semua di kecamatan.

Singkat cerita kemudian, bagaimana ini harusnya terjadi? Peraturan KPU dengan jelas mengatakan di salah satu pasalnya, saya buka saja, Pasal 25 mengenai Tata Cara Penyelesaian Keberatan pada ayat (3) dengan tegas memerintahkan kepada PPK untuk seketika melakukan pembetulan, apabila saksi atau Panwas kecamatan menyatakan keberatan terhadap selisih penghitungan suara di tingkat kecamatan. Koreksi kalau saya salah.

Proses ini ketika di kecamatan, ada dua ... partai yang sudah menyatakan keberatan. NasDem juga keberatan, kemudian saya lihat Demokrat juga keberatan, koreksi kalau salah. Artinya kan ada masalah. Maka atas nama Pasal 25 ini harusnya dikoreksi segera.

Nah kemudian, kalau ternyata fakta hukumnya setelah dikoreksi, maka akan keluar namanya D.Hasil kecamatan yang dikeluarkan oleh petugas operator. Kalau kemudian langsung diproses, tidak diverifikasi, tidak dicermati oleh saksi, maka terjadi pelanggaran Pasal 18 ayat (2). Apa bunyinya? PPK mencetak formulir model D.Hasil Kecamatan sebelum ditandatangani oleh saksi untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali oleh saksi. Apabila ada kesalahan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali model D.Hasil Kecamatan yang benar. Kita tidak akan bersidang di sini kalau proses itu dilakukan. Karena pasti selesai di kecamatan. "Oh, ini enggak benar, ini enggak benar." Bereskan! atas dasar Pasal 18 ini.

Nah, naik kemudian Pasal 48 ayat (9), dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum terselesaikan di kecamatan, KPU kabupaten/kota menyelesaikan kejadian keberatan khusus tersebut di atas. Maka ini pindah sekarang, karena tidak dibereskan di bawah. Harusnya sudah beres atas dasar Pasal 18 ini, tapi naik ke atas. Harusnya KPU Kota Jakarta Utara membereskan atas dasar 48 ini. Tidak membuangnya kemudian ke tingkat provinsi.

Nah, dalam hal masih terdapat ... masih ... karena ada perintah Pasal 59 ayat (3) dalam hal masih terdapat keberatan terhadap selesai rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten/kota diajukan oleh ... apa namanya ... saksi dan Bawaslu, maka KPU kabupaten/kota melakukan pembetulan seketika. Bayangkan ini, kecamatan harusnya beres, kabupaten/kota atas dasar perintah Pasal 59 harusnya beres, di provinsi atas dasar perintah Pasal 65 ayat (8) harusnya beres. Tapi kan kemudian kok kita berlarut-larut di sini. Akhirnya masuklah ke Bawaslu. Di Bawaslu ada rekomendasi penyelesaian administrasi.

Majelis, saya kebetulan jadi saksi dan saya tahu persis suasana kebatinan yang ada di situ. Bawaslu juga ingat saya ingin menyampaikan waktu itu usulan, mohon dalam perkara-perkara berkaitan dengan penyelesaian di Bawaslu, belajar dari pengalaman 2019. Catat kalau salah ... apa namanya ... data saya mbak, itu ada sekitar 13 kasus di Bawaslu yang tidak bisa dieksekusi karena Bawaslu mengeluarkan angka setelah rekapitulasi nasional yang sudah menjadi wilayah MK. Maka waktu itu saya mengusulkan. Begitu selesai tanggal 22 penetapan, proses perselisihan administrasi di Bawaslu tidak boleh mengeluarkan angka, sehingga dia tidak seperti kejadian 2019, keluar angka, orang dipilih oleh Bawaslu, tapi tidak bisa dieksekusi di Mahkamah Konstitusi.

Maka hari ini kemudian Bawaslu tertib, tidak pernah lagi begitu, putusnya keluar setelah tanggal 22 Maret, tidak pernah menyentuh angka, karena itu sudah menjadi ranah Mahkamah Konstitusi. Artinya, begitu kemudian Bawaslu menyatakan itu ada terjadi pelanggaran administrasi, maka bola, ketika bicara kebenaran angka itu ada di tangan Mahkamah Konstitusi dengan pintu masuk pelanggaran administrasi yang sudah dibukakan pintunya oleh Bawaslu.

Saya kira itulah kemudian ... apa namanya ... beberapa catatan yang ingin saya sampaikan, sampai pada satu kesimpulan bahwa. Pertama, perselisihan angka ini terjadi oleh karena penyelenggara tidak tertib administrasi. Dia melakukan pelanggaran berkaitan dengan pasal-pasal yang saya sebutkan di atas dan yang paling penting adalah persoalan kode etik.

Majelis yang terhormat, satu hal yang ingin saya sampaikan dan ini usulan untuk Majelis di sidang-sidang selanjutnya. Sepertinya ada satu aktor yang harusnya dihadirkan di tempat ini, di semua persidangan yang berkaitan dengan selisih suara di kecamatan. Siapa itu? Operator.

Operator inilah yang kemudian menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Jadi operator yang menginput itu Majelis, yang kalau kita bicara angka, orang itu harus jujur di sini. Angkanya berapa? Dia yang paling tahu. Karena dia yang bertanggung jawab penuh atas angka itu. Siapa operator? Bisa divisi teknik kecamatan. Siapa operator? Bisa Kasubag teknis. Siapa operator? Bisa staff, dalam kontak di Cilincing karena paralel dia banyak, bisa banyak yang jadi operator. Karena operator ini yang satu-satunya punya akun, punya password, dan punya username yang lain tidak bisa. Dia bisa bekerja kalau diperintah oleh orang lain. Maka, kalau ingin ini terang-benderang, dia itu dihadirkan di sini. Ini sebenarnya angkamumu yang benar yang mana?

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:10]**

Ya.

**30. AHLI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [14:10]**

Kenapa berbeda? Kira-kira begitu, Majelis.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:13]**

Ya.

**32. AHLI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [14:13]**

Saya kira terima kasih atas kesempatannya. Sekian paparan saya. Wassalamualaikum wr. wb.

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:18]**

Terima kasih. Sekaligus, Pak Ibnu. Silakan, Prof.

**34. AHLI TERMOHON: IBNU SINA CHANDRANEGARA [14:29]**

Baik. Bismillahirrahmanirrahim.

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:31]**

10 menit juga ya, waktunya.

**36. AHLI TERMOHON: IBNU SINA CHANDRANEGARA [14:33]**

Baik. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia. Izinkan saya menyampaikan keterangan Ahli saya, di bawah keahlian saya di Bidang Ilmu Hukum terkait dengan persoalan yang di ... yang diajukan dalam Perkara Nomor 09 ta ... PHPU.DPR-DPRD Tahun 2024, Perihal Perselisihan dan Hasil Pemilihan Anggota DPRD Tahun 2024, yang diajukan oleh Partai Demokrat.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, izinkan bahwa Ahli menilai terdapat tiga persoalan yang kemudian Ahli diminta untuk menjelaskan terkait dengan ... yang berkaitan dengan perkara yang saat ini diuji.

Ya itu terkait, pertama ialah pertanyaan berkaitan dengan rekapitulasi hasil secara berjenjang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu. Yang kedua adalah bagaimana perihal keberatan dalam proses rekapitulasi hasil berjenjang, yang kemudian diajukan ketika jenjang yang telah terlewati sebelumnya. Dan yang ketiga adalah dalam hal apabila ada suatu keberatan dilayangkan kepada tingkat provinsi mengenai suatu perhitungan pada tingkat kecamatan yang direkomendasikan oleh Bawaslu provinsi untuk

menyandingkan data, namun KPU pada tingkat provinsi tidak menjalankannya, maka apakah sikap KPU tersebut beralasan hukum.

Terhadap pertanyaan pertama atau persoalan pertama, Ahli menilai bahwa rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara adalah suatu proses penjumlahan hasil penghitungan dalam suara pemilu yang dalam Undang-Undang Pemilu, aktivitas ini diletakkan dalam bab 10 tentang penghitungan suara. Lebih jauh bab ini memuat 3 aktivitas, yaitu penghitungan suara, rekapitulasi penghitungan perolehan suara, dan mekanisme pengawasan dan sanksi atas penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara.

Ketiga, elemen tersebut merupakan elemen penting yang utama dalam proses pemilu yang memastikan hasil yang transparan, akurat, dan adil. Secara doktrinal, tahap perhitungan suara yang jelas terstruktur sebagaimana diatur dalam Pasal 381 hingga 409 Undang-Undang Pemilu dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap suara yang dihitung dan dicatat itu harus akurat. Secara konstruksi hukum, ini memungkinkan bahwa semua pihak bisa terlibat untuk mempertanggungjawabkan hasil perhitungan di setiap tahap. Selain itu, aspek transparansi penghitungan suara yang dijamin melalui penghitungan su ... suara secara terbuka memungkinkan pengawasan oleh saksi, pengawas pemilu, dan masyarakat. Ini membantu mencegah kecurangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

Undang-undang Pemilu juga memberikan jaminan bahwa setiap tahapan penghitungan suara akan memberikan kesempatan untuk memeriksa dan memvalidasi hasil, serta melakukan koreksi jika ditemukan kesalahan. Dan ini adalah hal yang penting untuk memerik ... memastikan hasil akhir yang akurat.

Yang kedua, dalam hal proses rekapitulasi berjenjang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 382 sampai dengan Pasal 409 pemilu, Ahli menilai bahwa model berjenjang tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa data perhitungan suara yang dikumpulkan dan diverifikasi secara bertahap dari tingkat TPS hingga tingkat nasional. Selain itu, model berjenjang juga dimaksudkan untuk mendistribusikan tanggung jawab. Hal ini juga setiap tingkat rekapitulasi melibatkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penghitungan suara di level tersebut. Mulai dari petugas TPS, PPK, KPU kabupaten/kota, provinsi, hingga KPU Pusat.

Distribusi tanggung jawab ini memastikan adanya check and balance dalam proses perhitungan suara. Di samping itu, rekapitulasi berjenjang memberikan lapisan keamanan tambahan di mana setiap tahapan penghitungan dan rekapitulasi dilindungi dari potensi manipulasi dan kecurangan yang di ... yang diatur secara yuridis. Bahkan secara spesifik, cakupan kegiatan rekapitulasi penghitungan perolehan suara meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian keberatan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (3) PKPU Nomor 5 Tahun 2024. Cakupan

tersebut menegaskan bahwa dalam satu tingkatan berjenjang dilalui-melalui kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian keberatan pada masing-masing jenjangnya.

Hal ini secara original intent dimaksudkan untuk memastikan bahwa pada tahapan jenjang selanjutnya, tidak mendapatkan kendala legitimasi yuridis maupun electoral atas tahapan jenjang sebelumnya. Kerangka yuridis yang demikian itu juga dimaksudkan agar tahapan rekapitulasi juga taat pada jadwal yang telah ditetapkan dan memastikan berjalan sesuai dengan perencanaan waktu yang ketat.

Berdasarkan Pasal 410 Undang-Undang Pemilu, sistem pengawasan terhadap rekapitulasi berjenjang dilakukan oleh berbagai pihak termasuk pengawas pemilu, saksi dari partai politik, lembaga pemantau, dan masyarakat umum untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Sedangkan pengaturan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam ... diatur bagi pelanggar aturan pemilu menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum dan keadilan. Dengan demikian dapat disimpulkan model rekapitulasi berjenjang memberikan jaminan prosedur atas penjumlahan hasil penghitungan suara dalam jenjangnya yang transparan, akurat, dan adil.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Bahwa terhadap persoalan kedua berkaitan dengan keberatan yang diajukan pada jenjang yang terlewati sebelumnya, maka Ahli berpendapat bahwa proses rekapitulasi ... rekapitulasi berjenjang dimaksudkan untuk membagi kewenangan dan tanggung jawab.

Pembagian kewenangan dan tanggung jawab dimaksud menyangkut kewenangan penyelesaian keberatan yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) PKPU 5/2024. Salah satu kegiatan yang penting yang dibagi kewenangan dan tanggung jawabnya adalah yang disebutkan Ahli sebelumnya, yaitu penyelesaian keberatan. Penyelesaian keberatan secara regulasi bahkan dibagi secara jelas antara jenjang kecamatan oleh PPK, Pasal 34 PKPU 5/2024, luar negeri oleh PPLN, kabupaten/kota oleh KPU kabupaten/kota, provinsi oleh provin ... KPU provinsi yang diatur sendiri dalam pasalnya yang dalam PKPU 5 Tahun 2024, dan nasional Pasal 91 yang diatur juga dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2024.

Lebih jauh terhadap adanya selisi rekapitulasi hasil perhitungan suara di setiap jenjang yang diajukan oleh saksi dan/atau Bawaslu, apabila dapat diterima, maka penyelenggara pada setiap jenjang yang diberikan wewenang untuk seketika melakukan pembetulan.

Ahli, menilai bahwa kewenangan penyelesaian keberatan yang terdistribusi dan terbagi secara prosedur diberi ... prosedur yang diberikan wewenang untuk seketika melakukan pembetulan menunjukkan adanya lapisan keamanan dimana setiap penghitungan suara ... perhitungan dan rekapitulasi dilindungi dari potensi manipulasi dan kecurangan. Di samping konstruksi jenjang kewenangan yang

demikian ini menunjukkan adanya kompetensi penanganan penyela ... penyelesaian keberatan yang berbeda-beda.

Terlepas adanya keberagaman badan pemutus yang berbeda dalam setiap jenjangnya juga menunjukkan bahwa adanya upaya menjaga kualitas akurasi dalam setiap proses rekapitulasi secara berjenjang. Sehingga dalam melakukan penjumlahan hasil perolehan suara atas hasil satu rekapitulasi ke rekapitulasi lainnya memberikan jaminan legitimasi bagi jenjang yang lebih tinggi selanjutnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian keberatan pada setiap jenjang tahapan telah dibagi dan terdistribusi kewenangan kepada penyelenggara sesuai dengan jenjang rekapitulasinya. Sehingga kewenangan sepanjang menyangkut adanya selisih rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara hanya dapat dilakukan pembetulan seketika (...)

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:24]**

Waktunya, Prof (...)

**38. AHLI TERMOHON: IBNU SINA CHANDRANEGARA [20:24]**

Sepanjang dilakukan oleh penyelenggara (...)

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:26]**

Waktunya 2 menit lagi (...)

**40. AHLI TERMOHON: IBNU SINA CHANDRANEGARA [20:26]**

Pada jenjang rekapitulasi.

Baik, Yang Mulia. Satu lagi, selesai Yang Mulia. Bahwa terhadap persoalan ketiga bahwa Ahli menilai bahwa ilustrasi yang dikemukakan apabila ... apabila KPU tidak menin ... di tingkat provinsi tidak menjalankan rekomendasi, maka hal tersebut menurut, Ahli beralasan hukum. Hal tersebut didasari bahwa penggunaan model berjenjang dalam proses rekapitulasi memiliki cakupan yang juga meliputi penyelesaian keberatan yang terkompartemen atau terbagi-bagi.

Secara prosedur sendiri dalam jenjang rekapitulasi misalnya adalah kecamatan, maka adanya keberatan atas selisih rekapitulasi hasil perolehan suara di kecamatan diajukan oleh saksi atau Panwas ... saksi dan Panwaslu dapat dilakukan sebelum penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di kecamatan dilakukan dan diumumkan. Apabila keberatan dikarenakan selisih rekapitulasi hasil dilakukan sebelum penetapan yang diajukan oleh saksi atau Panwaslu dapat diterima, maka PPK seketika melakukan pembetulan. Namun apabila ternyata tidak

maka harus dicatat dalam ... dicatat dalam keja ... kejadian ... sebagai kejadian khusus dalam formulir model D.Kejadian Khusus dan atau keberatan saksi KPU yang kemudian di lihat ... diteruskan di ... untuk pada su ... pada tingkatan suara di kabupaten/kota.

Dalam hal proses rekapitulasi di kabupa ... kabupaten/kota, maka salah satu tahapan pelaksanaan KPU adalah membuka sampul kertas tersegel yang berisi model D.Kejadian Khusus keberatan saksi KPU. Membacakannya dan menyelesaikan serta ... membacakannya setelah menjelaskan status penyelesaiannya.

Selanjutnya, dalam hal terdapat kejadian khusus atau keberatan yang belum dapat diselesaikan Kecamatan KPU kabupaten/kota, menyelesaikan kejadian khusus atau keberatan (vide Pasal 48 ayat (9) PKPU 5/2024.) Apabila, terdapat keberatan yang spesifik yang muncul dalam tingkat kabupaten/kota, maka KPU kabupaten/kota wajib mencatat seluruh kejadian khusus pelaksanaan rekapitulasi hasil di tingkat kabupaten/kota menggunakan formulir D.Kejadian Khusus atau keberatan saksi KPU.

Lalu dalam hal memasuki tingkat provinsi, KPU provinsi melakukan prosedur yang sama, namun kompetensi penyelesaian kejadian khusus dan keberatan hanya sepanjang kejadian khusus yang timbul pada tingkat kabupaten/kota.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian keberatan oleh KPU provinsi nyatanya hanya sebatas keberatan yang timbul pada tingkatnya sendiri dan yang spesifik muncul dalam tingkat kabupaten/kota sepanjang dicatat dalam formulir model D.Kejadian Khusus atau keberatan KPU pada tingkat kabupaten/kota. Sehingga berdasarkan hukum, KPU Provinsi tidak menjalankan untuk melakukan tindakan korektif pada jenjang kecamatan yang merupakan kewenangan PPK dan sepanjang dicatat dalam model D.Kejadian Khusus atau keberatan saksi KPU pada tingkat kecamatan, harus diselesaikan paling tinggi pada jenjang kabupaten/kota melalui kabupaten KP ... kabupaten/kota.

Demikian, Keterangan yang disampaikan sebagaimana mestinya.

#### **41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:20]**

Ya, terima kasih, Prof. Sekarang, ada yang perlu ditanyakan dari Pihak Pemohon atau sudah cukup? Apa yang ditanyakan? Silakan, pokok-pokoknya saja ya, pendek saja, ya.

#### **42. KUASA HUKUM PEMOHON: MEHBOB [25:35]**

Ya.



**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:35]**

Silakan.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: MEHBOB [25:35]**

Saksi Pemohon dulu, saksi Ahli Pemohon dan kemudian nanti ke Saksi Ahli Termohon.

Untuk Saksi Ahli Pemohon, bagaimana pendapat Ahli tentang kekuatan Keputusan Bawaslu dalam proses sengketa yang sedang kita tangani?

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:05]**

Itu untuk apa itu, bawa berat-berat itu, bukan upeti kan? Bukti tambahan itu? Apa? Mau dijadikan bukti atau bukan?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: MEHBOB [26:22]**

Sudah.

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:22]**

Sudah. Oke, kenapa ini dibawa masuk? Ya, sudah, silakan lanjutkan.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: MEHBOB [26:29]**

Ya, baik. Kemudian, pertanyaan selanjutnya buat Saksi Ahli (...)

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:33]**

Tadi dari Termohon bukti tambahannya sudah diserahkan? Oh, dari Pihak terkait? Sudah?

**50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [26:39]**

Sudah, Yang Mulia. Sudah siap.

**51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:42]**

Mana? Silakan, diserahkan. Termohon ada juga?

**52. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [26:50]**

Izin, Yang Mulia. Keterangan tertulis dari Ahli belum diserahkan.

**53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:50]**

Oke. Diserahkan sekalian. Ya, Keterangan Ahli, sudah diserahkan ke PP-nya.

Ya, silakan dilanjutkan.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: MEHBOB [27:16]**

Baik, pertanyaan selanjutnya buat Saksi Ahli Termohon. Tadi saya mendengarkan dengan seksama bahwa pendapat Saksi Ahli Termohon bahwa keberatan itu harus berjenjang.

Kemudian bahwa kami ... saksi kami di tingkat kecamatan sudah melakukan keberatan, tapi tidak diselesaikan sengketa ... seketika sebagaimana yang diatur oleh PKPU. Selalu oleh pihak penyelenggara dinaikkan ke atas, ke atas, sehingga tidak ada kepastian hukum dan sampai pada provinsi keberatan itu dikembalikan lagi bahwa itu sudah ... sudah tidak bisa ditangani karena itu harus di bawah satu tingkat. Inilah keberatan-keberatan kami sudah menjadi bukti juga. Jadi bagaimana kepastian hukum itu, kalau penyelenggara selalu mengalihkan ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga tidak terjadi penyelesaian seketika, sebagaimana yang diatur di PKPU Nomor 5.

Dengan pasal-pasal yang tadi disebutkan oleh Ahli kami. Bagaimana pendapat Ahli?

**55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:32]**

Ya. Dari Termohon, ada? Cukup?

**56. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [28:39]**

Ada, Yang Mulia.

**57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:00]**

Jadi ke mana? Silakan.

**58. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [28:43]**

Pertama untuk Ahli dari Pemohon dulu, Yang Mulia.

**59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:48]**

Ya, silakan.

**60. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [28:50]**

Ahli tadi, Ahli menjelaskan salah satu prinsip dalam pemilu kita adalah kepastian hukum, gitu. Nah, pertanyaan saya adalah ketika rekapitulasi tingkat kecamatan ditandatangani dan itu disahkan di tingkat kecamatan dan itu sudah melalui proses sebagaimana mestinya, kemudian itu menjadi acuan untuk rekap jenjang kabupaten, provinsi sampai dengan pusat, kan begitu. Apabila pada tingkat yang lebih tinggi. Misalnya kabupaten, provinsi apalagi, tiba-tiba ada koreksi yang jauh atau paling dasar di tingkat C.Hasil, misalnya. Apakah itu tidak menjadi apa, pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum? Itu satu

Yang kedua pertanyaan kepada Ahli. Proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, itu kan ada proses acara pembukaan dan seterusnya. Kemudian pembacaan dari setiap desa atau kelurahan. Sampai kepada akhirnya itu pencermatan, setelah dilakukan pencermatan diadakan pengesahan. Kemudian, acara itu ditutup, ditindak lanjut dengan penggandaan dan penanda tangan karena proses ini panjang. Menurut Ahli yang didefinisikan sebagai awal dan selesai rekapitulasi kecamatan itu di titik mana? Apakah pencermatan dan pengesahan hasil rekapitulasi itu? Atau malah pada untuk setiap kelurahan disahkan pada setiap kelurahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam range waktu rekapitulasi itu? Itu, Yang Mulia (...)

**61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:48]**

Ya.

**62. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [30:49]**

Untuk Ahli dari Pemohon.

Kemudian untuk Ahli dari Termohon. Ahli, ini kan ada lembaga negara yang namanya Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, yang punya struktur sampai di paling dasar penyelenggaraan pemilu, dia sampai di tingkat TPS dan mengawasi secara struktur di TPS, pemungutan dan perhitungan suara, di kecamatan rekapitulasi dan terus sampai kepada tingkat nasional.

Saya minta Ahli menjelaskan detail, apa original intent tujuan yang mulia ketika ini dibentuk struktur yang sangat ketat sejak dari bawah sampai ke atas. Itu yang kami mau minta penegasan dari Ahli.

Terima kasih, Yang Mulia.

**63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:42]**

Terima kasih. Dari Pihak Terkait, ada?

**64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [31:45]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Pihak Terkait kembali kami menegaskan bahwa apa keterangan yang disampaikan oleh Prof. Putu dan juga Bapak Prof. Ibnu, itu sangat cermat, karena memang sesuai dengan proses rekapitulasi berjenjang saat ini sudah jauh lebih baik dari tahun 2019.

Kemudian ada beberapa poin untuk penegasan akan ditanyakan oleh rekan kami.

**65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:10]**

Ya.

Menegaskan sendiri.

**66. KUASA HUKUM TERKAIT: ERIC MANURUNG [32:12]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

**67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:13]**

Ini menegaskan sendiri yang tanya sendiri biar anu, ya. Honorinya merata gitu, ya.

**68. KUASA HUKUM TERKAIT: ERIC MANURUNG [32:19]**

Siap, Yang Mulia.

Izin, hanya untuk mengklarifikasi, saya sekaligus saja kepada Ahli dari Pihak Pemohon maupun Pihak Termohon. Apakah pelanggaran administratif yang sudah ... kan tadi Saudara Ahli menyampaikan kita duduk di sini karena ada permasalahan. Kalau tidak sudah selesai di tingkat kecamatan.

Nah, menjadi pertanyaan saya, apakah setiap permasalahan kepemiluan ini yang terjadi, apakah pileg, pilpres segala macam dan sudah diperiksa oleh Bawaslu? Tadi Ahli menyatakan putusan Bawaslu pelanggaran administratif menjadi pintu atau jendela kepada Mahkamah Konstitusi. Apakah semua putusan Bawaslu yang Anda menyatakan pelanggaran administratif itu semua bisa masuk kepada MK? Dan boleh tahu di ketentuan diatur di mana? Mungkin begitu.

Terima kasih, Yang Mulia.

**69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33: 14]**

Oke cukup, ya.  
Sekarang Pak ... anu dulu.

**70. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAT [33:18]**

Yang Mulia.

**71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:19]**

Apalagi.

**72. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAT [33:20]**

Mohon keadilan karena tadi Pihak Termohon. Menjawab dua hal ...  
menanyakan dua hal. Kami dari Pihak Pemohon juga ingin  
menambahkan.

**73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:31]**

Tadi sudah satu kali kok.

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAT [33:33]**

Tadi dua, Yang Mulia. Termohon.

**75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:35]**

Ya, dua tapi yang tanya satu orang.  
Di sini satu orang sudah tanya cuma satu, dia tanya dua, itu  
sudah cukup, ya.

**76. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAT [33:43]**

Terima kasih.

**77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:45]**

Sekarang dari Pak Ibnu Sina dulu. Prof, silakan.

**78. AHLI TERMOHON: IBNU SINA CHANDRANEGARA [33:50]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

Pertama-tama Ahli ingin menerangkan dan menjelaskan bahwa dalam sistem pemilu kita me ... penghitungan suara itu sepanjang sejarah pemilihan umum kita selalu berkembang prejudice. Katanya prejudice bahwa kemudian penghitungan suara itu dianggap sumber persoalan dan tidak memurnikan daulat rakyat. Nah, atas hal yang demikian itu, Undang-Undang Pemilu kita menetapkan adanya rekapitulasi berjenjang. Proses rekapitulasi berjenjang ini tidak hanya berkaitan dengan kewenangan melaksanakan rekapitulasi, tetapi juga menyangkut penyelesaian keberatan. Nah, ketika proses pem ... penyelesaian keberatan ini terkompartemen oleh masing-masing tahapan, satu tahapan itu diberikan posisi menyelesaikan persoalannya sendiri dan mengirimkan ke tahap yang ada berikutnya.

Nah, tahap yang berikutnya yang ada di tengah dapat menyelesaikan persoalan yang muncul sendiri atau yang kemudian dibawa oleh pada proses sebelumnya. Jadi tidak ada proses lompat dalam satu tahapan. Nah, ketika ada frasa dapat dilakukan pembetulan seketika diawali oleh frasa yang ada dalam Pasal 34, Pasal 42, Pasal 75, Pasal 91, PKPU 5/2024 ada frasa dapat diterima. Artinya ada posisi di mana ketika diajukan adanya keberatan, adanya persoalan yang terjadi pada satu tingkatan ketika kemudian pejabat atau badan yang diberikan kewenangan membetulkan itu dapat menerima, maka dapat dilakukan perbaikan seketika. Aturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pejabat yang pada level jenjang tersebut diberikan kewenangan untuk melakukan pembetulan seketika, sehingga dikasih kebebasan itu. Sehingga pada tahapan jenjang berikutnya rekapitulasi yang dilakukan oleh badan berikutnya itu mendapatkan legitimasi secara hukum bahwa proses itu telah dilalui dan pada kewenangan tahapan bawahnya, itu sudah ada. Sehingga frasa *seketika* itu diawali dengan kalimat, dapat diterima. Selama dapat diterima, maka pembetulan seketika dapat dilakukan. Itu menjadi poin, bahwa penyelesaian keberatan itu terbagi di dalam, maupun luar negeri, dari tingkat yang paling rendah kecamatan, hingga pada tingkat provinsi.

Apabila misalnya suatu ketika datang keberatan tapi kemudian keberatannya itu tanpa disertai aspek prosedur, misalnya dalam proses mengajukan keberatan yang mengajukan keberatan itu tidak membawa mandat, tidak merupakan orang yang mempunyai otoritas untuk keberatan atas nama yang dikeberatkan. Lalu kemudian tidak ada bukti, bahwa keberatan itu berdasarkan, beralasan hukum. Maka badan yang kemudian diberikan kewenangan menyelesaikan keberatan tersebut atau mengoreksi secara seketika, dapat tidak menerima, apabila dianggap tidak cukup kuat. Sehingga beralasan hukum, kemudian hal tersebut tidak diterima dan dilakukan pembetulan seketika.

Yang kedua, adalah berkaitan dengan struktur Bawaslu dan lain sebagainya. Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam Undang-Undang Pemilu posisi Bawaslu itu dalam berbagai macam doktrin yang ada,

menjelaskan posisinya sebagai quasi judiciary . Bahkan, dia juga mempunyai kewenangan investigasi, bahkan dia punya kewenangan direct supervisi maupun indirect supervisi. Ada di setiap jenjang, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Bahkan dalam perkembangannya juga diberikan posisi, untuk memberikan keterangan pada persidangan di Mahkamah Konstitusi. Artinya, dalam segi regulasi diberikan kepastian, diberikan jaminan perlindungan, adanya keamanan dan kemurnian suara dari proses dan mekanisme pengawasan oleh Bawaslu yang berjenjang tersebut.

Nah, dalam hal perkembangannya kita menemui misalnya ada dalam kasus-kasus tertentu, putusan Bawaslu ataupun dan lain sebagainya itu tidak bercorak, yang kemudian bisa ditindaklanjuti dalam kasus tertentu tindaklanjut putusan badan yang memutus, bisa ditindaklanjuti dengan diam juga, gitu, dalam kasus tertentu dalam berbagai macam bentuknya. Itu menunjukkan bahwa adanya proses kepastian hukum di setiap tahapan.

Sehingga dalam konteks sistem pemilu di Indonesia saat ini, yang menjadi hal yang maju adalah adanya jaminan keadilan electoral, electoral justice di setiap tingkatan. Baik itu di tingkatan kecamatan, hingga saat ini kita berada di Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, saya rasa bahwa itu beberapa keterangan yang sudah mencakup semua pertanyaan, Yang Mulia. Terima kasih.

**79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:48]**

Ya, terima kasih, Pak Putu Artha. Silakan.

**80. AHLI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [38:51]**

Saya jawab tidak secara berurutan, tapi substansi masalah, soal kepastian hukum. Ketika berbicara soal kepastian hukum, maka kita jangan berhenti pada kepastian hukum procedural, tapi substansi. Apa itu? Substansi soal berapa sebetulnya real, suara sah milik, salah satu partai, milik salah satu calon dalam proses pemilu. Ini yang harus ditegakkan, dalam kerangka hukum pemilu kita. Ketika ada kemudian suara yang seharusnya tidak sah, atau suara yang berkurang kemudian ditambah, maka itulah dosa terbesar bagi penyelenggara yang kemudian, tidak berhasil menegakkan kepastian hukum itu sendiri. Di atas, di bawah itu baru kita bicara soal kepastian hukum menyangkut masalah prosedur, hukum proses pemilu, proses rekapitulasi yang dilakukan.

Nah berkaitan dengan, juga tadi pertanyaan soal awal dan akhir, termasuk kelurahan, maka rekapitulasi berjenjang di kecamatan itu, dalam kasus Cilincing dan kasus-kasus yang lain oleh karena jumlah TPS-nya besar, baju besarnya tetap rekapitulasi kecamatan, tetapi dibuat

paralel. Tidak bisa ditafsirkan bahwa kelurahan ini diketuk palu lalu sah, tidak. Ini by process semua yang nanti seluruh TPS itu terkumpulkan, kemudian di print out, dicetak dalam formulir D kecamatan. Itulah yang kemudian disahkan dan itulah jadi dokumen otentik terakhir.

Persoalannya, sidang ini mesti membuka terang-benderang, kenapa ada keberatan-keberatan itu. Harus di cross-check. Saya mencoba membaca permohonan segala macam, informasi yang berkembang yang harus di-clear kan di forum ini adalah tidak diberikan ruang sesuai dengan regulasi, yang saya sampaikan tadi kepada para saksi untuk mencermati itu dengan benar lalu melakukan cross-check.

Idealnya, kalau memang terjadi keberatan di sana, di kecamatan, gampang betul. Anda tunjuk TPS-nya mana, buka C.Hasil, sandingkan, selesai. Tetapi modus yang juga terjadi, kita harus mengakui dengan jujur di berbagai tempat, karena kita mohon maaf kalau istilah kasarnya "kita buaya" enggak bisa dikadali karena punya pengalaman itu. Kawan-kawan yang mau nakal-nakal ini, saya tidak mengatakan kejadian yang di sini, Majelis lah yang akan menelusuri nanti apa benar seperti itu misalnya atau tidak. Modusnya itu selalu terjadi di kecamatan karena tidak lagi ada rekap PPS, maka yang akan diatur kemudian TPS-nya dan lebih khusus lagi tidak suara per TPS karena clear ini semua C.Hasil, tapi begitu di jumlah akan berbeda, selalu seperti itu. Hampir di semua persidangan yang saya ikuti, ya seperti itu.

Nah, ketika kemudian ini jumlahnya berbeda milik NasDem, buktinya di persidangan katanya NasDem juga angkat tangan. "Eh, bukan begitu suara saya, eh nanti diklarifikasi." Ini juga angkat tangan misalnya, Pemohon juga angkat tangan, artinya kan ada persoalan di angka itu.

Nah, ini yang sebetulnya harus di cross-check di C.Hasil. Tapi hampir di semua tempat kemudian dibuang ... apa namanya ... ke level yang lebih tinggi. Nah, kalau itu diselesaikan seketika, maka sebutnya tidak harus ke atas. Di atas pun di KPU Kota Jakarta Utara seharusnya dengan leadership yang baik, pengalaman saya sebagai penyelenggara di masa lalu, saya akan cluster itu, mana kecamatan-kecamatan yang bermasalah yang serius itu diselesaikan dulu. Tuntaskan, baru yang aman-aman ini dibelakangkan. Sehingga tidak ada residu lagi masalah. Dan keberatan itu dibuka. Harusnya ini di Jakarta Utara sudah klir. Keberatan dari misalnya Pemohon, mana? Di mana selisihnya? Panggil. Cek di KPU Jakarta Utara. Itu masih bisa, tapi ini kan, ya kita paham lah selalu ... apa namanya ... persoalan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi ini kan yang kita lihat selalu politik delay time terus delay time buang, buang, buang. Nah, sehingga lewat itu barang, kira-kira begitu. Nah apakah itu terjadi di sini? Majelis lah yang nanti akan memeriksa seluruh fakta-fakta persidangan ini.

Jadi itu, awal-akhir tidak ada rekapitulasi kelurahan. Yang ada adalah rekapitulasi di kecamatan yang kemudian dibuat parallel di tiap-



tiap kelurahan. Entah saya tidak tahu di Cilincing apa ada lima paralel atau berapa paralel. Tetapi kemudian di situ D.Hasil-nya hanya satu saja untuk semua tempat.

Kemudian, soal apa ini? Apakah pelanggaran administratif selalu ditindaklanjuti masuk ke Mahkamah Konstitusi? Tidak. Saya kemudian hadir di persidangan. Terakhir sebelum selesai jadi ... apa namanya ... NasDem juga. Kadar NasDem, mohon maaf. Jadi kadar NasDem, saya ikut di persidangan. Sayalah yang mengusulkan, karena saya tahu betul 5 tahun lalu ada residu 13 kasus. Angkanya Bawaslu itu tidak bisa ditindaklanjuti. Ini menang, ini menang, ini sekian-sekian. Tapi karena tidak bisa masuk ke MK. Enggak bisa. Ini kan jadi problem hukum. Jadi bisa jadi disertasi itu, bisa jadi tesis itu. Kalau dalam proses hukum karena ada masalah hukum. Makanya saya katakan ini ada kejadian begini. Proses rekapitulasi nasional hari ini tolong jangan lagi meninggalkan residu.

Maka pada saat itulah para pihak saya lihat termasuk Bawaslu setuju dan KPU setuju. Baik untuk seluruh rekapitulasi nasional yang masih menyisakan persoalan angka, ketika itu masuk ranah Bawaslu, maka Bawaslu setelah tanggal 22 tidak boleh merekomendasi soal selisih suara, hanya prosedurnya. Nanti bahwa prosedur itu berkaitan dengan selisih suara, ranah Mahkamah Konstitusi.

Saya ingin mengatakan dengan penegasan itu, secara ... di forum itu, artinya apa? Ranah Mahkamah Konstitusi ini punya otoritas untuk menyelesaikan persoalan ini dengan pintu masuk rekomendasi Bawaslu soal persoalan prosedur tadi itu. Ini juga menjawab pertanyaan nomor satu dari Pemohon. Lalu bagaimana legitimasi putusan Bawaslu? Ketika Bawaslu hadir di ruangan ini, tidak hanya urusan sidang hari ini, hadir di sini sebagai pihak yang memberi keterangan dan di banyak permohonan, keterangan Bawaslu juga berkaitan dengan angka-angka, maka atas nama undang-undang, Bawaslu punya legitimasi kuat atas seluruh keterangan yang disampaikan.

Termasuk ada pertanyaan-pertanyaan mendasar. Pak Putu, kalau angkanya Bawaslu dengan angka Pemohon atau apa, angka Bawaslu lah, angka paling pertama yang bisa menjadi penyanding dari sebuah kebenaran empirik. Kenapa? Peraturan Bawaslu, undang-undang memberi otoritas kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan berkaitan dengan selisih suara dan angka. Maka kalau ada perdebatan dalam rekapitulasi termasuk di Cilincing atau apa, Bawaslu pasti ngomong begini, Bawaslu gimana? Ya, angka saya juga beda ini, tolong rapikan. Karena dia punya angka, semua. Maka angka Bawaslu legitimate dalam proses persidangan ini untuk dihadirkan sebagai pembuktian manakala persidangan ini tidak bisa menga ... menghadirkan head to head antara C-1.Hasil Termohon dengan Pemohon misalnya.

Saya kira konstruksi berpikir saya demikian Majelis, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.

**81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:40]**

Baik. Itu satu tadi dari Pemohon, pendek saja. Saya persilakan.

**82. AHLI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [45:45]**

Kalian legitimasi (...)

**83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:45]**

Eenggak. Ini yang tadi mau tambah, minta tambah.

**84. AHLI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [45:47]**

Oh, minta tambah.

**85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:48]**

Daripada masih lapar saya kasih tambah satu.

**86. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAT [45:51]**

Ya.

**87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:51]**

Pendek saja, ya.

**88. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAT [45:52]**

Terima kasih Yang Mulia. Langsung aja, Saudara Ahli.

**89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:57]**

Ahli siapa yang mau ditanya?

**90. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAT [45:59]**

Ahli dari kami. Dari Pihak Pemohon, Yang Mulia, Pak Putu.

**91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:02]**

Oke.

**92. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAT [46:03]**

Ini (...)

**93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:03]**

Pak Putu.

**94. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAT [46:03]**

Dalam hal pengalaman ahli selaku penyelenggara ... apa ... selaku Bawaslu, ya. Terkait (...)

**95. AHLI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [46:09]**

KPU?

**96. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAT [46:09]**

Dengan ... ya, KPU.

Terkait dengan kejadian yang ada di Cilincing, dimana ada 233 TPS se-Kecamatan Cilincing, yang merupakan ada penambahan angka lebih sekitar 2.402 kenaikan suara NasDem.

Nah, di mana saksi dari Pihak Pemohon pada saat itu kan sudah melakukan keberatan. Nah, tidak ada secara terbuka oleh PPK dilakukan koreksi ataupun rekomendasi dari pengawas pemilu kecamatan maupun Bawaslu kota. Tetapi, perubahan angka-angka ini malahan dibiarkan terjadi.

Ini pendapat ahli terhadap ini, tadi kami mohon dipertegas. Bahwa apakah ditambah lagi dengan adanya putusan Bawaslu provinsi DKI Jakarta yang membenarkan adanya pergeseran angka ini, itu memang wajar untuk dilakukan penyandingan data, dimana seperti yang Ahli sampaikan tadi. Bahwa di forum ini harus ada head to head data terhadap perubahan-perubahan angka ini.

Demikian.

**97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:19]**

Ya. cukup, ya?  
Silakan, Pak Putu.

**98. AHLI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [47:21]**

Baik. Singkat saja, prinsip dasar rekapitulasi itu adalah jangan pernah menyisakan residu suara. Selesaikan di situ, apapun caranya. Pak

Putu, pun ada spare waktu. No! Waktunya cuma tanggal 22 Maret, mana ada rekapitulasi nasional ini hari on time semua. Gak ada cerita itu. Jadi, tuntaskan di situ, dalam kasus misalnya di Cilincing ini, kalau saya jadi KPU Jakarta, saya turun, saya bilang, buka semua itu, buka, cross-check adu data semua, masih ada keberatan, cek lagi satu-satu, dan begitu diprint, makanya pasal tadi berbunyi, D.Hasil ada keberatan, dicek lagi. Nah, barulah ditandatangani

Kalau prosedur-prosedur ini, nanti di persidangan akan terbuka dari saksi-saksi tidak dilakukan, jelas terjadi pembiaran. Jelas terjadi pembiaran karena modus yang terjadi di berbagai tempat, sekali lagi pengalaman saya mengurus semacam ini selalu terjadi di kecamatan, locus-nya di kecamatan, selalu dihasil objek perkaranya, selalu politik buying time, dibuang ke atas, tidak. Dan biasanya ini, biasanya di berbagai tempat itu akan di rekapitulasi terakhir-terakhir pada waktu bagian-bagian akhir, sehingga tidak ada waktu lagi dan seterusnya, lalu di buang dan seterusnya. Maka form hari ini harus menjelaskan secara utuh sebetulnya surat klir seperti apa, sederhana saja. Saya kira perdebatan ini akan sederhana dilakukan oleh Majelis Hakim, hanya ada dua.

Pertama, adu data. Bawaslu berapa datanya? Yang disengketakan dari 200 berapa, tadi? 213, data Bawaslu berapa? Data Pemohon berapa? Data Termohon berapa? Data Terkait berapa? Jadi, saya tidak tahu angkanya seperti apa. Tapi begitu Bawaslu misalnya sama dengan Pemohon, sudah selesai karena dia punya angka. Tapi kalau Majelis, masih ragu, cek lagi C.Hasil di 213, itu adu data, sehingga klir semua.

Saya kira demikian jawaban saya, terima kasih.

**99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:05]**

Saya masih ada, Pak Putu. Ya, ini Pemohon supaya tadi honorinya ditambah. Saya mau tanya soalnya.

Begini, Pak Putu. Data otentik itu di mana?

**100. AHLI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [49:21]**

Ada di dalam kotak C.Hasil itu, Majelis.

**101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:22]**

Itu berupa apa? C.Hasil apa?

**102. AHLI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [49:24]**

C.Plano Kalau kita dulu nyebutnya C-1 Plano (...)

**103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:26]**

C-1 Plano, ya? (...)

**104. AHLI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [49:26]**

Ya. Yang ada, tallnya itu.

**105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:28]**

Plano, ya? Itu yang hasil?

**106. AHLI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [49:30]**

He eh.

**107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:30]**

Ya, sekarang yang jadi masalah sementara, yang diadu yang ada di Mahkamah ini.

**108. AHLI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [49:36]**

He em.

**109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:36]**

Adalah C.Salinan yang dipunyai Pemohon, C.Salinan yang dipunyai Terkait, C.Salinan yang ... termasuk Bawaslu punyaanya C.Salinan. Nah, sekarang KPU ini menyerahkan pada kita hanya D.

**110. AHLI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [49:55]**

D.Hasil.

**111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:56]**

D.Hasil? Jadi C.Planonya belum sampai ke sini. Itu kan nanti sumber otentik untuk mencocokkan seluruhnya. Kan C.Plano kan?

**112. AHLI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [50:04]**

Ya.

**113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:05]**

Oke, terima kasih. Yang pertama.  
Kemudian yang kedua. Yang kedua tadi berhubung, anu ... memunculkan hal baru, Pak Putu. Saya juga sangat senang itu. Operator.

**114. AHLI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [50:18]**

Ya.

**115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:18]**

Karena kemajuan teknologi sekarang kan pakai semuanya computerize, ada operator. Pada waktu dibuka kotak suara.

**116. AHLI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [50:29]**

Ya.

**117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:30]**

Kemudian dia harus, pembukaannya memenuhi peraturan.

**118. AHLI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [50:34]**

Ya

**119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:35]**

Disaksikan oleh Bawaslu, saksikan oleh partai politik peserta, kemudian ada aparat kepolisian untuk menyaksikan bersama-sama. Dibuatkan Berita Acara pembukaan kotak. Bahwa itu memang di dalam kotak dan otentik C.Planonya kan? Apakah ... pertanyaan saya. Apakah pada waktu pembukaan kotak itu, mer ... KPU membuka kotak itu kan untuk kepentingan membuka C.Plano 1?

**120. AHLI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [51:05]**

Ditempel (...)

**121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:05]**

Ditempel itu. Dibuka kemudian di kopi atau di print out kalau itu berupa PDF.

**122. AHLI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [51:12]**

Bukan (...)

**123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:13]**

Apa?

**124. AHLI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [51:13]**

Begini, Majelis. Urutan-urutannya. Jadi, Sirekap web dibuka. Di situ kan ada foto C, bahasanya biar gampang C-1 Plano lah, C.Hasil.

**125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:23]**

C.Hasil? Plano kan? Bukan (...)

**126. AHLI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [51:24]**

Ada foto, yang ada di kotak, dibuka.

**127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:26]**

Ya.

**128. AHLI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [51:26]**

Ditempel.

**129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:27]**

Ya.

**130. AHLI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [51:28]**

Disandingkan.

**131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:29]**

Ya.

**132. AHLI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [51:29]**

Oh, ternyata ini, makanya kemarin kan ada ribut Sirekap banyak salah itu.

**133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:32]**

Ya.

**134. AHLI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [51:32]**

Oh, ternyata ini pembacaannya salah. Nah, diperbaiki.

**135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:35]**

Yang dibawa sebagai bukti dari Termohon kepada Mahkamah itu, apa?

**136. AHLI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [51:40]**

Ya, seharusnya C (...)

**137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:42]**

C-1 Planonya.

**138. AHLI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [51:43]**

Termohon karena KPU kan punya otoritas. Kalau Majelis memerintahkan membuka kotak untuk ngecek C-1 nya itu, atau C.Hasil (...)

**139. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:49]**

Ya.

**140. AHLI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [51:50]**

Ya itu, clear sudah.

**141. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:51]**

Ini banyak kasus terjadi, KPU itu menyembunyikan C.Plano (...)

**142. AHLI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [51:58]**

Tidak. Masih ada di dalam kotak, Majelis.



**143. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:59]**

Nah, ya, makanya itu (...)

**144. AHLI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [52:00]**

Dan masih (...)

**145. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:00]**

Makanya itu, ini kita minta untuk kita cocokkan.

**146. AHLI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [52:03]**

Betul.

**147. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:04]**

Tapi pada waktu dibuka itu, apakah itu juga dibagikan kepada para pihak? Tidak kan?

**148. AHLI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [52:10]**

Tidak, karena cuma satu saja dia (...)

**149. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:12]**

Ya, untuk kepentingan pembukaan di Mahkamah kan (...)

**150. AHLI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [52:13]**

Ya, nanti setelah selesai lagi dilipet, lagi dimasukkan ke dalam kotak.

**151. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:17]**

Baik, terima kasih kalau begitu, ya.

**152. AHLI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [52:19]**

Terima kasih.

**153. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:20]**

Terima kasih, Pak Putu. Terima kasih, Prof Ibnu, silakan meninggalkan persidangan.

**154. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [52:25]**

Mohon izin, Yang Mulia, bila berkenan satu pertanyaan kembali.

**155. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:29]**

Sudah cukup, sudah cukup, ya.

**156. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [52:30]**

Baik, baik, Yang Mulia.

**157. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:30]**

Ya, sudah cukup.

Silakan Prof, kalau kita tahan-tahan kan harus yang bayar itu lama, kasian yang bayar nanti.

**158. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAT [52:39]**

Karena per jam, Yang Mulia.

**159. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:40]**

Ya, ini, ya kan. Harganya mahal, ahli itu. Itu tasnya saja besarnya, kayak gitu.

Terima kasih, ya. Pak Putu, terima kasih Prof Ibnu Sina.

Sekarang para saksi untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu.

Dari Pemohon, saya persilakan.

Achmad Rizky Fadillah, Prihita Handoko, Usman, Firmansyah, dari Pemohon.

Dari Termohon, saya tanya, Pak Sudirman masih jadi anu ... atau sudah mantan? Mantan? Mantan, kalau mantan harus disumpah. Karena sudah tidak menerima honor, ya harus disumpah.

Kemudian Pak Arfah Madrianta, ini juga mantan. Oke, lho ini Pak Sudirman kok dua, ada dua memang Pak Sudirmannya? Oke, Pak Sudirman yang kedua, mantan juga? Mantan, silakan untuk diambil sumpah.

Pak Abie Maharullah Madugiri sudah, masih aktif? Aktif di mana, komisioner? Di tingkat Jakarta Utara. Oke. Pak Dody Widjaya, masih komisioner? Di KPU DKI. Provinsi, ya berarti, ya? Oke. Tidak perlu disumpah kalau itu.

Dari Pihak Terkait, Pak Sahir Kaimudin, kemudian Pak Suci Lestari, oh Ibu toh, kemudian Bu Lis Miani, Bu Sinta Permanasari, Pak Saripudin. Semuanya beragama Islam.

Mohon perkenan, Yang Mulia Prof. Anwar.

**160. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [54:51]**

Ya, Yang Mulia, terima kasih.

Semuanya ikuti saya.

“Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya.”

**161. SAKSI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH [55:09]**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya.

**162. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [55:32]**

Ya, terima kasih. Yang Mulia, saya kembalikan.

**163. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:35]**

Terima kasih, Prof. Anwar. Silakan kembali ke tempat.

Perlu saya sampaikan terlebih dahulu, penyampaian keterangan Saksi ini digunakan oleh Mahkamah untuk menentukan putusan, ya. Jadi yang sangat membutuhkan keterangan Para Saksi adalah Mahkamah.

Oleh karena itu, saya akan memandu apa yang harus saya tanyakan kepada Para Saksi, selain uraian apa yang sudah dibuat ini. Oleh karena itu, Para Pihak tidak perlu menanyakan, kalau seandainya pertanyaannya sama atau ada hal-hal yang sangat berbeda, baru saya persilakan. Tapi kalau kita anggap sudah cukup, maka tidak perlu bertanya, ya.

Baik, dari yang pertama, Pemohon dari Partai Demokrat. Nomor 1, Achmad Risky Fadillah. Yang mana? Oke, silakan. Pak Achmad ini pada waktu pemilu kemarin sebagai apa? Silakan.

**164. SAKSI PEMOHON: ACHMAD RISKY FADILLAH [57:03]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum. Sebagai saksi, Yang Mulia.

**165. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:07]**

Saksi mandat?

**166. SAKSI PEMOHON: ACHMAD RISKY FADILLAH [57:08]**

Saksi yang bermandat.

**167. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:10]**

Ya, di mana? Di tingkat TPS, di tingkat kecamatan, atau di tingkat mana?

**168. SAKSI PEMOHON: ACHMAD RISKY FADILLAH [57:16]**

Di tingkat PPS, juga di tingkat kecamatan, Yang Mulia.

**169. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:18]**

PPS-nya di PPS mana?

**170. SAKSI PEMOHON: ACHMAD RISKY FADILLAH [57:20]**

Di PPS Kalibaru, Yang Mulia.

**171. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:22]**

Kalibaru. Kalibaru itu masuk di Kecamatan Cilincing juga, ya?

**172. SAKSI PEMOHON: ACHMAD RISKY FADILLAH [57:26]**

Ya, masuk di Kecamatan Cilincing.

**173. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:28]**

Oke, Kalibaru berapa? TPS berapa?

**174. SAKSI PEMOHON: ACHMAD RISKY FADILLAH [57:32]**

Seluruh TPS, Yang Mulia.

**175. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:33]**

Seluruh TPS di Kalibaru?

**176. SAKSI PEMOHON: ACHMAD RISKY FADILLAH [57:36]**

Ya, jadi di PPK Cilincing berbasis penghitungan TPS saya menjadi saksinya, Yang Mulia.

**177. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:41]**

Oke. Terus apa yang akan Anda sampaikan?

**178. SAKSI PEMOHON: ACHMAD RISKY FADILLAH [57:47]**

Ya, izin, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim.

**179. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:50]**

Sudah diizinkan, sudah saya tanya kok. Sudah diizinkan, masa minta izin lagi. Ya, silakan. Apa yang anu ... langsung saja.

**180. SAKSI PEMOHON: ACHMAD RISKY FADILLAH [57:58]**

Yang akan saya jelaskan poinnya itu tentang kejadian ketika saya keberatan, Yang Mulia.

**181. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:04]**

Oke, keberatannya kenapa?

**182. SAKSI PEMOHON: ACHMAD RISKY FADILLAH [58:06]**

Jadi, pada tanggal 5 ... 5 Maret 2024, saya mengajukan keberatan ketika perhitungan rekapitulasi PPK Kecamatan Cilincing, yang mana membacakan D.Hasil kecamatan, Yang Mulia.

**183. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:21]**

Ya, D.Hasilnya ternyata bagaimana?

**184. SAKSI PEMOHON: ACHMAD RISKY FADILLAH [58:23]**

Yang mana D.Hasilnya itu, langsung saja, perolehan jumlah suara dari Partai NasDem itu sekitar 36.124. Ternyata dari hasil tabulasi kami

selama menjadi saksi di tingkat PPK Cilincing berbasis TPS, tabu ... tabulasi kami itu perolehan suara jumlah ... jumlah suara perolehan Partai NasDem=30.955, Yang Mulia.

**185. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:57]**

Itu dari tabulasi yang Anda lakukan berdasarkan C.Salinan, ya?

**186. SAKSI PEMOHON: ACHMAD RISKY FADILLAH [59:01]**

Ya, Mulia.

**187. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:02]**

Ya, kan? Jadi, C.Salinan Anda dari seluruh Kecamatan Cilincing itu 30.000?

**188. SAKSI PEMOHON: ACHMAD RISKY FADILLAH [59:09]**

955, Yang Mulia.

**189. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:10]**

955. Ini berdasarkan C.Salinan?

**190. SAKSI PEMOHON: ACHMAD RISKY FADILLAH [59:14]**

Ya, Yang Mulia.

**191. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:16]**

Terus kemudian di D.Hasilnya menurut Anda berapa?

**192. SAKSI PEMOHON: ACHMAD RISKY FADILLAH [59:19]**

Di D.Hasil yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Cilincing sebanyak 36.124, Yang Mulia.

**193. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:26]**

36.124. Jadi ada penambahan suara di situ?

**194. SAKSI PEMOHON: ACHMAD RISKY FADILLAH [59:32]**

Ya, Yang Mulia.

**195. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:33]**

Berapa penambahan suaranya? Selisihnya itu?

**196. SAKSI PEMOHON: ACHMAD RISKY FADILLAH [59:37]**

5.000-an, Yang Mulia, kurang lebih.

**197. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:40]**

5.119?

**198. SAKSI PEMOHON: ACHMAD RISKY FADILLAH [59:41]**

Ya, Yang Mulia.

**199. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:42]**

Oke, 5.169, ya?

**200. SAKSI PEMOHON: ACHMAD RISKY FADILLAH [59:48]**

Ya, Yang Mulia.

**201. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:48]**

Ya, terus Anda protes, toh?

**202. SAKSI PEMOHON: ACHMAD RISKY FADILLAH [59:51]**

Ya.

**203. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:52]**

Protes ini ada catatannya?

**204. SAKSI PEMOHON: ACHMAD RISKY FADILLAH [59:54]**

Landasan protes saya. Yang pertama, dapat informasi daripada rekan kami (...)

**205. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:59]**

Ya.

**206. SAKSI PEMOHON: ACHMAD RISKY FADILLAH [59:59]**

Yang hadir pada tanggal 4 sebelumnya, Yang Mulia.

**207. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:01]**

Ya.

**208. SAKSI PEMOHON: ACHMAD RISKY FADILLAH [01:00:02]**

Bahwasannya penyampaian daripada proses itu, ketua PPK menyampaikan pada tanggal 4 ada arahan atau ada instruksi daripada KPU untuk sinkronisasi DPT, juga pengguna hak suara, Yang Mulia. Itu menjadi alasan saya pribadi karena adanya kenaikan angka tersebut (...)

**209. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:23]**

Ya.

**210. SAKSI PEMOHON: ACHMAD RISKY FADILLAH [01:00:24]**

Itu salah satu menjadi alasan saya untuk keberatan, Yang Mulia.

**211. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:28]**

Oke, keberatannya ditulis di mana? Pada waktu rekapitulasi ... masih di rekapitulasi tingkat kecamatan?

**212. SAKSI PEMOHON: ACHMAD RISKY FADILLAH [01:00:34]**

Ya, Yang Mulia.

**213. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:35]**

Oke, ditulis di dalam form khusus keberatan?

**214. SAKSI PEMOHON: ACHMAD RISKY FADILLAH [01:00:38]**

Ya, ditulis, Yang Mulia.

**215. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:39]**

Oke, terus anu ... sudah ditindaklanjuti koreksinya, belum?



**216. SAKSI PEMOHON: ACHMAD RISKY FADILLAH [01:00:45]**

Nah, itu, Yang Mulia. Tidak ada pengkoreksian waktu persidangan, hanya waktu di-skors saja, Yang Mulia.

**217. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:54]**

Oh, waktunya di-skors?

**218. SAKSI PEMOHON: ACHMAD RISKY FADILLAH [01:00:55]**

Ya, Yang Mulia.

**219. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:57]**

Terus kemudian tidak ada tindak lanjut berikutnya berarti?

**220. SAKSI PEMOHON: ACHMAD RISKY FADILLAH [01:01:01]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**221. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:02]**

Setelah di-skors, enggak ada apa-apa?

**222. SAKSI PEMOHON: ACHMAD RISKY FADILLAH [01:01:05]**

Dibacakan kembali, Yang Mulia.

**223. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:06]**

Sama yang dibacakan?

**224. SAKSI PEMOHON: ACHMAD RISKY FADILLAH [01:01:07]**

He eh, dibacakan kemudian kembali.

**225. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:09]**

Kemudian, Partai Demokrat memperoleh suara berapa?

**226. SAKSI PEMOHON: ACHMAD RISKY FADILLAH [01:01:14]**

Partai Demokrat ... sebentar, Yang Mulia. Agak lupa, sudah lama.

**227. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:22]**

Oke, kalau begitu, pada waktu di-skors, kemudian dibacakan lagi. Sudah enggak usah dicari yang Demokrat!

**228. SAKSI PEMOHON: ACHMAD RISKY FADILLAH [01:01:29]**

Ya, Yang Mulia.

**229. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:30]**

Nanti kita cari sendiri.  
Pada waktu di-skors, itu awal pada waktu diumumkan, dibacakan oleh PKK[sic!]-nya?

**230. SAKSI PEMOHON: ACHMAD RISKY FADILLAH [01:01:38]**

Ya, Yang Mulia.

**231. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:39]**

36.124?

**232. SAKSI PEMOHON: ACHMAD RISKY FADILLAH [01:01:41]**

Ya, Yang Mulia.

**233. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:42]**

Terus kemudian setelah di-skors, dibaca ulang?

**234. SAKSI PEMOHON: ACHMAD RISKY FADILLAH [01:01:45]**

Ya. Jadi ketika (...)

**235. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:46]**

Dibaca ulang itu, bertambah atau berkurang?

**236. SAKSI PEMOHON: ACHMAD RISKY FADILLAH [01:01:49]**

Nah, ketika pembacaan ulang, yang saya dapat informasi yang ada di dalam, itu rekan kami, karena saya langsung ke tim. Itu ada penambahan, penambahan kembali yang tadinya 3 ... 3.600 (...)

**237. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:03]**

36.000 (...)

**238. SAKSI PEMOHON: ACHMAD RISKY FADILLAH [01:02:04]**

36.124 menjadi 36.369.

**239. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:10]**

Oke, setelah dikoreksi malah bertambah, ya?

**240. SAKSI PEMOHON: ACHMAD RISKY FADILLAH [01:02:12]**

Malah bertambah.

**241. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:13]**

Oke, itu ... di situ cukup, ya?

**242. SAKSI PEMOHON: ACHMAD RISKY FADILLAH [01:02:15]**

Dan itu ... ya.

**243. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:16]**

Itu di ... dari 20 ... 233 TPS, ya?

**244. SAKSI PEMOHON: ACHMAD RISKY FADILLAH [01:02:21]**

Ya, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia.

**245. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:22]**

Oke, cukup, ya.  
Berikutnya sekarang Pak Prihata[sic!] Handoko.

**246. SAKSI PEMOHON: PRIHITA HANDOKO [01:02:28]**

Prihita Handoko, Yang Mulia.

**247. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:30]**

Prihita?

**248. SAKSI PEMOHON: PRIHITA HANDOKO [01:02:32]**

Siap, Yang Mulia.

**249. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:33]**

Prihita Handoko. Jadi, apa ini?

**250. SAKSI PEMOHON: PRIHITA HANDOKO [01:02:37]**

Izin, saya sebagai saksi yang bermandat.

**251. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:40]**

Di Cilincing, juga?

**252. SAKSI PEMOHON: PRIHITA HANDOKO [01:02:41]**

Di Cilincing.

**253. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:42]**

Yang masuk di dalam persidangan?

**254. SAKSI PEMOHON: PRIHITA HANDOKO [01:02:45]**

Siap, Yang Mulia.

**255. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:46]**

Berarti, apa yang disampaikan oleh Pak Achmad tadi, betul?

**256. SAKSI PEMOHON: PRIHITA HANDOKO [01:02:49]**

Siap, betul, Yang Mulia.

**257. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:50]**

Semuanya sama, ya, yang disampaikan?

**258. SAKSI PEMOHON: PRIHITA HANDOKO [01:02:51]**

Sama.

**259. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:53]**

Oke, kalau begitu tidak perlu diulang. Tapi tahu Partai Demokrat, dapatnya berapa, tahu?

**260. SAKSI PEMOHON: PRIHITA HANDOKO [01:02:58]**

Tahu, Yang Mulia. Tapi, izin (...)

**261. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:00]**

Berapa Demokrat? Kalau enggak tahu, sudah jangan susah ... enggak usah. Apa yang akan Anda sampaikan? Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Achmad sudah benar?

**262. SAKSI PEMOHON: PRIHITA HANDOKO [01:03:15]**

Ya, Pak.

**263. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:16]**

Ada yang beda?

**264. SAKSI PEMOHON: PRIHITA HANDOKO [01:03:18]**

Izin, saya menambahkan saja, Yang Mulia.

**265. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:19]**

Apa yang ditambahkan?

**266. SAKSI PEMOHON: PRIHITA HANDOKO [01:03:20]**

Ya, proses perhitungan rekapitulasi di Kecamatan Cilincing itu dari tanggal 15 sampai tanggal 5.

**267. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:27]**

Oh, ya, itu prosesnya.

**268. SAKSI PEMOHON: PRIHITA HANDOKO [01:03:28]**

Ya. Prosesnya adalah tanggal 15 sampai tanggal 3 itu proses rekapitulasi yang berjalan dengan normal.

**269. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:35]**

Ya.

**270. SAKSI PEMOHON: PRIHITA HANDOKO [01:03:36]**

Di tanggal 4, ya. Ketika ada dilanjutkan penghitungan rekapitulasi tersebut.

**271. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:42]**

Ya.

**272. SAKSI PEMOHON: PRIHITA HANDOKO [01:03:43]**

Namun tidak dilanjutkan karena ada instruksi tadi.

**273. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:46]**

Oke.

**274. SAKSI PEMOHON: PRIHITA HANDOKO [01:03:47]**

Oleh KPU Kota Jakarta Utara.

**275. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:48]**

Ya, sama.

**276. SAKSI PEMOHON: PRIHITA HANDOKO [01:03:49]**

Nah, yang menjadi apa ... ganjalan saya adalah ketika para saksi juga ingin meminta D.Hasil.

**277. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:57]**

Ya.

**278. SAKSI PEMOHON: PRIHITA HANDOKO [01:03:58]**

Pada tanggal 4 itu, karena yang menjadi landasan untuk di-skors itu adalah apa ... sinkronisasi DPT dan hak pengguna suara.

**279. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:08]**

Ya.

**280. SAKSI PEMOHON: PRIHITA HANDOKO [01:04:09]**

Jadi kami meminta karena kami merasa yakin kalau hanya sinkronisasi DPT, berarti suara kami insya Allah aman.

**281. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:16]**

Ya.

**282. SAKSI PEMOHON: PRIHITA HANDOKO [01:04:17]**

Seperti itu, Yang Mulia. Lalu, tidak diberikan D.Hasil tersebut di tanggal 4. Lalu dilanjut, Yang Mulia (...)

**283. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:22]**

Ya.

**284. SAKSI PEMOHON: PRIHITA HANDOKO [01:04:23]**

Di tanggal 5. Di tanggal 5 ... 5 tersebut pada siang harinya kami diberikan draf dokumen D.Hasil.

**285. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:32]**

D.Hasil?

**286. SAKSI PEMOHON: PRIHITA HANDOKO [01:04:33]**

Ya, yang kami sebut itu adalah dokumen pertama, Yang Mulia.

**287. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:36]**

Ya.

**288. SAKSI PEMOHON: PRIHITA HANDOKO [01:04:37]**

Berupa PDF.

**289. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:38]**

Ya.

**290. SAKSI PEMOHON: PRIHITA HANDOKO [01:04:38]**

Oleh ketua PPK.

**291. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:40]**

Ya.

**292. SAKSI PEMOHON: PRIHITA HANDOKO [01:04:41]**

Secara online atau via WhatsApp.

**293. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:44]**

Ya.

**294. SAKSI PEMOHON: PRIHITA HANDOKO [01:04:44]**

Ya, japri, Yang Mulia.

**295. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:46]**

Ya.

**296. SAKSI PEMOHON: PRIHITA HANDOKO [01:04:47]**

Oke. Lalu dibacakanlah hasil rekapitulasi itu di layar, mela ... sama dengan apa yang kami (...)

**297. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:54]**

Terima?

**298. SAKSI PEMOHON: PRIHITA HANDOKO [01:04:54]**

Terima. Berupa PDF, Yang Mulia.

**299. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:57]**

Ya.



**300. SAKSI PEMOHON: PRIHITA HANDOKO [01:04:58]**

Dari urutan presiden sampai dengan DPR dan DPD (...)

**301. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:03]**

Oke, kita enggak persoalkan itu, sama, ya.

**302. SAKSI PEMOHON: PRIHITA HANDOKO [01:05:04]**

Berjalan dan itu disahkan melalui draft itu. Lalu pada DPRD, ya. Tadi ... yang tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Risky bahwasannya memang ada keberatan dari Beliau Saudara Risky karena ada kenaikan angka karena di tabulasi kami itu sangat jauh berbeda, Yang Mulia.

**303. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:22]**

Ya, itu kan tabulasi Anda berdasarkan C.Hasil kan?

**304. SAKSI PEMOHON: PRIHITA HANDOKO [01:05:24]**

Ya.

**305. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:25]**

Ya.

**306. SAKSI PEMOHON: PRIHITA HANDOKO [01:05:26]**

Yang kami hitung dari tanggal (...)

**307. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:27]**

Ya.

**308. SAKSI PEMOHON: PRIHITA HANDOKO [01:05:28]**

15 sampai tanggal 5 Maret.

**309. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:29]**

Terus, Anda yang masuk di dalam anu toh ... rapat rekapitulasi itu toh, tanda tangan enggak?

**310. SAKSI PEMOHON: PRIHITA HANDOKO [01:05:36]**

Tidak, Yang Mulia.

**311. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:37]**

Oke, tidak tanda tangan. Tidak tanda tangan hasil D1-nya kan?

**312. SAKSI PEMOHON: PRIHITA HANDOKO [01:05:43]**

Tidak, Yang Mulia.

**313. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:44]**

D.Hasil itu enggak tanda tangan kan?

**314. SAKSI PEMOHON: PRIHITA HANDOKO [01:05:45]**

Tidak, Yang Mulia.

**315. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:46]**

Oke, sudah cukup, ya.  
Kemudian Usman, Pak Usman.

**316. SAKSI PEMOHON: USMAN [01:05:53]**

Siap.

**317. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:54]**

Saksi di tingkat KPU Kota Jakarta Utara.

**318. SAKSI PEMOHON: USMAN [01:05:57]**

Ya.

**319. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:58]**

Oke, apa yang akan Anda sampaikan?

**320. SAKSI PEMOHON: USMAN [01:06:02]**

Yang saya sampaikan sebenarnya saya selain saksi di tingkat kota  
(...)

**321. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:08]**

Ya.

**322. SAKSI PEMOHON: USMAN [01:06:09]**

Saya juga sebagai koordinator IT. Jadi selam ... kejadian step by step dari kecamatan sampai kota, itu semua sudah terekam dalam tabulasi kami (...)

**323. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:19]**

Oke.

**324. SAKSI PEMOHON: USMAN [01:06:20]**

Dimana proses penghitungan rekapitulasi di PPK semua tiap harinya melaporkan ke saya.

**325. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:25]**

Ya, jadi Anda mengikuti proses itu semua?

**326. SAKSI PEMOHON: USMAN [01:06:28]**

Ya.

**327. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:29]**

Jadi angka-angkanya yang disampaikan Pak Risky, disampaikan Prihita, betul, ya?

**328. SAKSI PEMOHON: USMAN [01:06:35]**

Ya.

**329. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:36]**

Itu ada peni ... penambahan suara di Partai NasDem?

**330. SAKSI PEMOHON: USMAN [01:06:40]**

Justru tanggal 5 ... proses tanggal 5 mau rekapitulasi dibuka itu, setelah di-share PDF yang pertama.

**331. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:46]**

He eh.

**332. SAKSI PEMOHON: USMAN [01:06:47]**

Itu sudah kami temukan adanya perubahan dan saksi yang di dalam saya perintahkan untuk keberatan.

**333. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:53]**

Oke.

**334. SAKSI PEMOHON: USMAN [01:06:54]**

Karena (...)

**335. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:55]**

Tadinya di awal pada waktu D.Hasil yang awal Itu sudah 36.124?

**336. SAKSI PEMOHON: USMAN [01:07:00]**

124.

**337. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:01]**

Itu saja sudah ditambah?

**338. SAKSI PEMOHON: USMAN [01:07:03]**

Ya, itu saja sudah ditambah.

**339. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:04]**

Tidak sesuai dengan C.Salinannya?

**340. SAKSI PEMOHON: USMAN [01:07:06]**

Ya.

**341. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:06]**

Ya, terus pada waktu berhenti (...)

**342. SAKSI PEMOHON: USMAN [01:07:09]**

Waktu berhenti, terus di-skors.

**343. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:11]**

Di-skors.

**344. SAKSI PEMOHON: USMAN [01:07:11]**

Malam itu yang dibacakan justru PDF lain, yang tidak dibagi.

**345. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:16]**

Oke.

**346. SAKSI PEMOHON: USMAN [01:07:17]**

Yang sebelumnya tidak pernah dibagi.

**347. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:18]**

Terus tambah lagi suaranya menjadi 36.369?

**348. SAKSI PEMOHON: USMAN [01:07:21]**

Bertambah lagi, 36.369.

**349. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:21]**

Oke.

**350. SAKSI PEMOHON: USMAN [01:07:24]**

Dan penambahan itu tidak melalui proses sanding data, tidak diketahui oleh saksi-saksi lainnya.

**351. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:30]**

Padahal C-nya menurut Anda, tabulasinya hanya 30.955 itu?

**352. SAKSI PEMOHON: USMAN [01:07:38]**

Ya.

**353. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:39]**

Oke. Cukup, ya?

**354. SAKSI PEMOHON: USMAN [01:07:42]**

Semua keberatan juga sudah kami sampaikan.

**355. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:43]**

Pada waktu rekapitulasi di tingkat kota (...)

**356. SAKSI PEMOHON: USMAN [01:07:46]**

Ya.

**357. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:47]**

Pak (...)

**358. SAKSI PEMOHON: USMAN [01:07:47]**

Kami juga sampaikan kebenaran[sic!] di tingkat kota, ada waktu sehari dan malam kami kumpulkan semua bukti C.Salinan, yang kami punya, sekaligus rekap-rekap TPS-TPS mana saja, artinya di saat pleno di kota itu kami semua bawa bukti.

**359. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:08]**

Ya.

**360. SAKSI PEMOHON: USMAN [01:08:09]**

Se-container, 1 box container C.Plano ... eh, C.Salinan (...)

**361. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:12]**

Oke, ya, ya.

**362. SAKSI PEMOHON: USMAN [01:08:15]**

Tapi di situ tidak satu pun keberatan kami (...)

**363. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:18]**

Diakomodasikan?

**364. SAKSI PEMOHON: USMAN [01:08:18]**

Meskipun 1-2 TPS yang ... yang di ... yang ditindaklanjuti.

**365. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:20]**

Oke. Pada waktu rekapitulasi di tingkat KPU Kota Jakarta Utara, Pak Usman, tanda tangan?

**366. SAKSI PEMOHON: USMAN [01:08:31]**

Tidak.

**367. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:32]**

Tidak tanda tangan juga karena protesnya atau permintaan koreksinya tidak diakomodasikan?

**368. SAKSI PEMOHON: USMAN [01:08:37]**

Ya, bahkan sempat kami sampaikan 1-2 TPS yang ... yang sangat berubah signifikan, termasuk di Cilincing TPS 1, 2, 3 (...)

**369. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:46]**

Oke.

**370. SAKSI PEMOHON: USMAN [01:08:47]**

Hanya saja tidak diakomodir, apalagi untuk diadakan ... di ... disanding data, tidak ada sama sekali.

**371. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:56]**

Baik, ini jadi meliputi 233 TPS itu, ya? Di Cilincing (...)

**372. SAKSI PEMOHON: USMAN [01:09:02]**

Ya, itu pun karena yang kami punya.

**373. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:05]**

Di 236 atau 233?

**374. SAKSI PEMOHON: USMAN [01:08:07]**

233.

**375. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:09]**

233. Kemudian dari ... itu Kelurahanya Cilincing sampai Kelurahan Semper Barat itu?

**376. SAKSI PEMOHON: USMAN [01:09:15]**

Ya, 7 kelurahan.

**377. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:17]**

7 kelurahan. Oke, terima kasih Pak Usman, sudah cukup, ya.

**378. SAKSI PEMOHON: USMAN [01:09:24]**

Siap.

**379. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:25]**

Terus sekarang, Pak Firmansyah. Pak Firmansyah?

**380. SAKSI PEMOHON: FIRMANSYAH [01:09:31]**

Ya, Yang Mulia.

**381. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:33]**

Pak Firmansyah kok kayak pemain band saja gayanya. Saya kira band, dari band apa itu? Ya, Pak Firmansyah sebagai saksi mandat?

**382. SAKSI PEMOHON: FIRMANSYAH [01:09:47]**

Siap, siap, Yang Mulia.

**383. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:48]**

Di tingkat provinsi?



**384. SAKSI PEMOHON: FIRMANSYAH [01:09:49]**

Saya saksi mandat di tingkat provinsi, Yang Mulia.

**385. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:52]**

Oh ini bosnya berarti, ya, saksi mandatnya di tingkat provinsi. Apa yang mau disampaikan, Pak Usman ... Pak Firmansyah?

**386. SAKSI PEMOHON: FIRMANSYAH [01:09:58]**

Baik. Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**387. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:01]**

Tuh betul kan suaranya bagus kan?

**388. SAKSI PEMOHON: FIRMANSYAH [01:10:06]**

Baik, merujuk ... merujuk dan menindaklanjuti lembar kejadian khusus yang sudah diajukan oleh saksi mandat dari Partai Demokrat di tingkat kecamatan, khususnya PPK Kecamatan Cilincing. Lalu lembar kejadian khusus juga yang dibuat oleh saksi mandat kami di tingkat KPU Jakarta Utara. Maka ketika saya menjadi saksi mandat di tingkat provinsi, saya melakukan permohonan ataupun pengajuan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta dengan saya membawa Alat Bukti C.Hasil ... C.Salinan asli, ya. Asli yang artinya tanda tangan basah, bukan copy.

**389. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:02]**

C asli, ya?

**390. SAKSI PEMOHON: FIRMANSYAH [01:11:04]**

C.Salinan.

**391. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:05]**

Ya, terus?

**392. SAKSI PEMOHON: FIRMANSYAH [01:11:06]**

Ya. Di sini kami memohon kepada pimpinan sidang saat itu, yang mana komisioner KPU DKI, untuk melakukan proses koreksi, perbaikan, dan sanding data, Yang Mulia.

**393. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:20]**

Ya.

**394. SAKSI PEMOHON: FIRMANSYAH [01:11:21]**

Namun, pada saat itu permohonan kami ditolak, Yang Mulia.

**395. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:28]**

Oke, di tolak.

**396. SAKSI PEMOHON: FIRMANSYAH [01:11:29]**

Dengan alasan perbaikan, koreksi, dan sebagainya hanya bisa dilakukan 1 tingkat di bawahnya.

**397. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:39]**

Oke.

**398. SAKSI PEMOHON: FIRMANSYAH [01:11:40]**

Nah, izin, Yang Mulia. Lagi-lagi, ya, ini bagai kesambar petir di siang hari ini, Yang Mulia. Artinya (...)

**399. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:48]**

Siang hari kalau hujan, ya, petir ada, biasa saja.

**400. SAKSI PEMOHON: FIRMANSYAH [01:11:50]**

Siap. Siap salah, Yang Mulia.

**401. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:56]**

Kalau siang hari enggak hujan, enggak ada petir, enggak mungkin, gitu.

**402. SAKSI PEMOHON: FIRMANSYAH [01:11:59]**

Betul, Yang Mulia. Saya lanjutkan, Yang Mulia. Ya, jadi kami di sini, Partai Demokrat, merasa seperti dipermainkan, kenapa? Karena kami melakukan keberatan itu dari mulai jenjang yang paling bawah, di tingkat kecamatan. Bahkan ada dua, Yang Mulia.

**403. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:14]**

Dilempar-lempar terus ke atas?

**404. SAKSI PEMOHON: FIRMANSYAH [01:12:16]**

Sepakat, Yang Mulia.

Lalu ketika sudah masuk di tahapan provinsi, harapan kami, ya, harapan kami itu dapat diakomodir. Namun malah dibuang lagi ke bawah. Akhirnya kami seperti diping-pong, Yang Mulia.

**405. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:32]**

Oke.

**406. SAKSI PEMOHON: FIRMANSYAH [01:12:34]**

Ya. Diping-pong.

**407. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:34]**

Akhirnya menjadi pemohon untuk diselesaikan di Mahkamah, gitu kan, intinya?

**408. SAKSI PEMOHON: FIRMANSYAH [01:12:40]**

Nah, jadi ... belum juga, Yang Mulia. Ini agak menarik nanti ... ini akan lebih menarik, Yang Mulia.

**409. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:45]**

Ya.

**410. SAKSI PEMOHON: FIRMANSYAH [01:12:46]**

Jadi pada saat di provinsi, ya. Saya itu mengajukan untuk sanding data, namun terus ditolak, ya. Lalu saya memanfaatkan agar mendapatkan perhatian dari ... ya, peserta rapat pleno tersebut karena saya pegang data C.Salinan, ya, waktu itu kebetulan ada di TP ... yang saya sempat bacakan. Akhirnya dikasih izin lah, ya, didengarkan oleh peserta rapat. Saya buka, itu di Kelurahan Marunda TPS 36, Yang Mulia, Kecamatan Cilincing, dimana saya bacakan ketika sidang tersebut, jumlah suara Partai NasDem beserta calegnya, totalnya adalah sekitar 5 suara, Yang Mulia.

**411. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:38]**

Ya.

**412. SAKSI PEMOHON: FIRMANSYAH [01:13:39]**

Ya.

**413. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:40]**

Ya-nya kok banyak sekali itu.

**414. SAKSI PEMOHON: FIRMANSYAH [01:13:43]**

Ya, 5 suara. Namun, ketika D.Hasil, kita sandingkan juga D.Hasil-nya, yang sudah ditandatangani atau disahkan oleh PPK, itu 19. Sehingga ada deviasi, Yang Mulia, 14 suara.

**415. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:57]**

Oke.

**416. SAKSI PEMOHON: FIRMANSYAH [01:13:58]**

Tidak putus di sana, Yang Mulia. Lalu saya buka situs KPU atau website KPU melalui Info Pemilu. Dimana di Info Pemilu itu, ya, semua orang bisa memonitor C.Hasil yang di-upload dari tingkat TPS saat itu ataupun C.Plano.

**417. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:17]**

Ya.

**418. SAKSI PEMOHON: FIRMANSYAH [01:14:18]**

Ketika kita buka, sama seperti C.Salinan yang kami miliki, itu 5 suara, Yang Mulia.

**419. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:25]**

Hanya 5?

**420. SAKSI PEMOHON: FIRMANSYAH [01:14:26]**

Hanya 5. Lalu saya pertanyakan, siapa yang bisa membantah, ya, data yang ada di Info Pemilu ini? Akhirnya semua peserta terdiam, Yang Mulia.

**421. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:39]**

Ya.

**422. SAKSI PEMOHON: FIRMANSYAH [01:14:39]**

Oke. Nah, lanjut. Ada yang lebih menarik, ada satu lagi. Akhirnya saya kasih sebuah contoh, contoh kasus di Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, di TPS 16, Yang Mulia.

**423. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:54]**

TPS 16, Cilincing.

**424. SAKSI PEMOHON: FIRMANSYAH [01:14:56]**

Ya, di TPS 16.

**425. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:57]**

Ya. Gimana itu?

**426. SAKSI PEMOHON: FIRMANSYAH [01:15:00]**

Oke. Dimana berdasarkan C.Salinan yang kami bawa, jumlah suara Partai NasDem beserta caleg keseluruhan adalah 15 suara, Yang Mulia.

**427. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:12]**

15 suara?

**428. SAKSI PEMOHON: FIRMANSYAH [01:15:13]**

Oke. Lalu, di forum tersebut kebetulan saya juga pegang draft. D.Hasil yang pertama kali dikirimkan oleh Ketua PPK Kecamatan Cilincing melalui WhatsApp yang sudah kami cetak.

**429. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:28]**

Ya.

**430. SAKSI PEMOHON: FIRMANSYAH [01:15:28]**

Ya, yang di siang hari. D.Hasil yang pertama, suara Partai NasDem dan seluruh calegnya adalah 23.

**431. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:36]**

23.

**432. SAKSI PEMOHON: FIRMANSYAH [01:15:37]**

Artinya ada deviasi 8 suara.

**433. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:40]**

Ya.

**434. SAKSI PEMOHON: FIRMANSYAH [01:15:41]**

Ya.

**435. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:42]**

Terus?

**436. SAKSI PEMOHON: FIRMANSYAH [01:15:42]**

Lalu kami sandingkan kembali Ketua ... Yang Mulia, dengan D.Hasil yang sudah disahkan oleh PPK.

**437. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:49]**

Ya.

**438. SAKSI PEMOHON: FIRMANSYAH [01:15:50]**

Dimana suara NasDem dan suara caleg keseluruhan menjadi 33, Yang Mulia.

**439. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:56]**

33. Naik lagi?

**440. SAKSI PEMOHON: FIRMANSYAH [01:15:57]**

Naik lagi dari deviasi yang sebelumnya.

**441. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:00]**

Itu lagunya, "Naik-naik ke puncak gunung."

**442. SAKSI PEMOHON: FIRMANSYAH [01:16:01]**

Sepakat, Yang Mulia.

**443. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:04]**

Terus?

**444. SAKSI PEMOHON: FIRMANSYAH [01:16:04]**

Lalu, setelah itu, izin. Saya sandingkan juga dengan Info Pemilu, sama seperti C.Salinan, C.Hasilnya, Yang Mulia.

**445. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:11]**

Oke. Ya.

**446. SAKSI PEMOHON: FIRMANSYAH [01:16:12]**

Atau C.Planonya.

**447. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:13]**

Oke.

**448. SAKSI PEMOHON: FIRMANSYAH [01:16:14]**

Oke.

**449. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:16]**

Ya. Terakhir (...)

**450. SAKSI PEMOHON: FIRMANSYAH [01:16:16]**

Oke.

**451. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:16]**

Sudah cukup, ya? Saya kira sudah cukup ini.

**452. SAKSI PEMOHON: FIRMANSYAH [01:16:20]**

Baik.

**453. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:20]**

Untuk membuktikan itu.

**454. SAKSI PEMOHON: FIRMANSYAH [01:16:21]**

Oke.

**455. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:22]**

Apa lagi?

**456. SAKSI PEMOHON: FIRMANSYAH [01:16:22]**

Izin, Yang Mulia. Berdasarkan yang saya utarakan di forum tersebut, akhirnya Bawaslu DKI mengajukan permohonan juga di forum tersebut kepada pimpinan rapat untuk sanding data.

**457. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:38]**

Ya.

**458. SAKSI PEMOHON: FIRMANSYAH [01:16:39]**

Ya. Namun, lagi-lagi ditolak, Yang Mulia.

**459. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:44]**

Oke. Cukup, ya? Sudah jelas.

**460. SAKSI PEMOHON: FIRMANSYAH [01:16:47]**

Baik.



**461. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:48]**

Jadi, se (...)

**462. SAKSI PEMOHON: FIRMANSYAH [01:16:48]**

Sedikit lagi, Yang Mulia. Izin.

**463. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:50]**

Apa lagi?

**464. SAKSI PEMOHON: FIRMANSYAH [01:16:51]**

Nah, ada ini lagi. Setelah kami memang membuat di situ di provinsi ... di tingkat provinsi, ya. Kami membuat ... mengisi formulir lembar kejadian khusus juga karena sesuai dengan arahan dari KPU DKI. Tidak putus di sana, Yang Mulia. Kami juga melaporkan ini, membawa ini, membuat laporan secara resmi kepada Bawaslu Provinsi DKI.

**465. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:16]**

Ya.

**466. SAKSI PEMOHON: FIRMANSYAH [01:17:17]**

Ya. Yang mana putusannya selama saat persidangan adalah Bawaslu Provinsi DKI memutuskan PPK Kecamatan Cilincing, KPU Jakarta Utara, KPU Provinsi DKI melakukan pelanggaran administrasi.

**467. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:39]**

Oke. Cukup, ya?

**468. SAKSI PEMOHON: FIRMANSYAH [01:17:40]**

Cukup, Yang Mulia.

**469. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:41]**

Ini yang dibutuhkan.

**470. SAKSI PEMOHON: FIRMANSYAH [01:17:41]**

Terima kasih.

**471. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:42]**

Terima kasih. Ya, itu Pak Firmansyah *ya* kebanyakan itu. Kok tidak ada tidaknya, tapi *ya* semua. Ya, cukup ya ini untuk Para Pihak. Kemudian sekarang kita ke Termohon. Termohon, Pak Sudirman?

**472. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:18:04]**

Izin, Yang Mulia.

**473. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:06]**

Gimana?

**474. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:18:06]**

Izin, Yang Mulia.

**475. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:06]**

Apa?

**476. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:18:07]**

Mohon urutan pemeriksaannya yang pertama Saksi M. Arfah Madrianta, Yang Mulia.

**477. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:14]**

Oke, ya.

**478. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:18:16]**

Ketua PPK-nya, terima kasih, Yang Mulia.

**479. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:17]**

Ya. Pak Madrianta Arfah, ya? Nomor 2, ya?

**480. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:18:20]**

Siap, Yang Mulia.

**481. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:20]**

Ini mantan PPK Kecamatan Cilincing. Silakan, pakai mik yang ada. Enggak usah anu ... kalau ... pakai mik saja. Petugas miknya mana? Sudah? Silakan. Berdiri, Pak, berdiri!

**482. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:18:36]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**483. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:40]**

Ya.

**484. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:18:43]**

Cilincing ada sejumlah 1.134 TPS, Yang Mulia. TPS terbanyak di Jakarta Utara, yang tersebar di 7 kelurahan.

**485. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:54]**

7 kelurahan, ya?

**486. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:18:55]**

Ya.

**487. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:56]**

Oke.

**488. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:18:00]**

Pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi di Kecamatan Cilincing itu mulai dari tanggal 15 dan berakhir di (...)

**489. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:05]**

Ya.

**490. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:19:05]**

Tanggal 3 Maret 2024, Yang Mulia.

**491. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:09]**

Ya. Terus?

**492. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:19:12]**

Di hari pertama, kami menjelaskan perihal tata tertib (...)

**493. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:16]**

Itu ... yang itu (...)

**494. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:19:18]**

Siap.

**495. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:18]**

Lewat saja kayak, gitu. Normatif itu.

**496. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:19:22]**

Pelaksanaan rekapitulasi, rapat rekapitulasi kami mulai di tanggal 16, Yang Mulia.

**497. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:28]**

Itu sana dibagi bera (...)

**498. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:19:29]**

Yang dihadiri (...)

**499. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:29]**

Berapa ... berapa panel itu, Cilincing?

**500. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:19:31]**

Itu pertama kami buka 1 panel, Yang Mulia.

**501. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:00]**

Hanya 1 panel? Terus?

**502. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:19:35]**

Di hari kedua ... di hari kedua, 3 panel, Yang Mulia.

**503. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:40]**

Ya.

**504. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:19:41]**

Terus kemudian, di hari ketiga, 7 panel.

**505. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:43]**

Jadi 7 panel.

**506. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:19:44]**

Sejumlah 7 kelurahan.

**507. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:45]**

Oke.

**508. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:19:46]**

Terus kemudian, di hari ke-10 kami tambah lagi menjadi 10 panel, Yang Mulia.

**509. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:51]**

10 panel, ya.

**510. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:19:52]**

Terus kemudian di hari ke-15, kami jadikan lagi 12 panel.

**511. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:58]**

Jadi 12 panel. Terakhir berjumlah 12 panel?

**512. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:20:03]**

Karena jumlah TPS (...)  
Ya. 12 panel, Yang Mulia, dari tanggal (...)

**513. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:05]**

Dari berapa TPS tadi?

**514. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:20:06]**

1.134, Yang Mulia.

**515. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:10]**

1.134 TPS?

**516. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:20:11]**

Ya.

**517. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:11]**

Ya.

**518. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:20:12]**

Kalau kita tidak tambah panel, Yang Mulia.

**519. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:14]**

Eggak, waktunya, ya, enggak, ngejar ya?

**520. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:20:17]**

Ya.

**521. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:17]**

Itu 7 kelurahan, 1.134 TPS, ya?

**522. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:20:21]**

Betul, Yang Mulia.

**523. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:21]**

Oke.

**524. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:20:21]**

Rata-rata per kelurahan 200 TPS, Yang Mulia.

**525. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:25]**

200 TPS? Ya.

**526. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:20:27]**

Nah, dalam proses rapat rekapitulasi yang ada di setiap panel, kami sudah penuh semua kelengkapan-kelengkapannya, Yang Mulia.

**527. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:36]**

Ya.

**528. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:20:37]**

Termasuk layar proyektor, laptop, Infocus, sama papan tulis.

**529. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:40]**

Ya.

**530. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:20:41]**

Yang buat menempel C.Planonya.

**531. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:44]**

Ya.

**532. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:20:45]**

Dalam proses rekapitulasi, Yang Mulia, kami tetap mengacu kepada PKPU Nomor 5 Tahun 2004.

**533. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:53]**

Ya.

**534. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:20:54]**

Di mana, setiap panel ketika ingin memulai rapat Plenonya, harus sudah dihadiri oleh seluruh peserta rapat.

**535. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:02]**

Ya.

**536. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:20:03]**

Adalah di antaranya lah, partai ... peserta partai.

**537. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:06]**

Ya.

**538. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:21:07]**

Paslon PPWP (...)

**539. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:09]**

Bawaslu?

**540. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:21:09]**

Dan DPD. Jadi, ini dari Bawaslu juga termasuk.

**541. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:12]**

Ya.

**542. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:21:13]**

Jadi, ini semua kalau sudah terpenuhi baru panel bisa dibuka oleh PPK.

**543. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:20]**

Oke.



**544. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:21:20]**

Nah, proses pembukaannya juga, Yang Mulia, tetap kami mengacu kepada PKPU Nomor 5 Tahun 2004.

**545. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:26]**

Ya.

**546. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:21:27]**

Di mana yang pertama, Yang Mulia adalah membuka kotak suara segel.

**547. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:30]**

Ya.

**548. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:21:31]**

Jadi, kotak suara segel, kami minta untuk ketua KPS menghantarkan kotak suara segel, terus kemudian setelah dibuka kotak suara yang tersegel, Yang Mulia, kita ambil sampul yang berisi C.Plano (...)

**549. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:45]**

Ya.

**550. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:21:46]**

Atau C.Hasil (...)

**551. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:46]**

C.Hasil Plano, ya?

**552. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:21:48]**

Yang besar itu, Yang Mulia.

**553. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:48]**

Ya.

**554. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:21:49]**

C. Hasil inilah, Yang Mulia, yang kami tempel di papan tulis yang sudah disiapkan di setiap panel masing-masing.

**555. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:56]**

Ya.

**556. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:21:57]**

Jadi, ditempel oleh kami, terus kemudian setelah itu barulah kami minta PPS untuk dibacakan (...)

**557. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:07]**

Dibacakan.

**558. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:22:08]**

Per lembar-per lembar dari awal.

**559. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:11]**

Ya.

**560. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:22:12]**

Nah, pelaksanaan pembacaan ini, Yang Mulia, kita selesaikan satu per satu. Artinya dimulai dengan PPWP terlebih dahulu.

**561. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:19]**

Ya. Itu (...)

**562. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:22:21]**

Setelah perhitungan PPWP (...)

**563. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:21]**

Itu dari Plano di over ke menjadi D, ya?

**564. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:22:26]**

Ya.

**565. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:27]**

Ya.

**566. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:22:28]**

Jadi setelah dibuka C.Planonya di papan tulis yang besar, lalu kemudian dibacakan oleh PPS, disesuaikan dengan yang ada di Sirekap, Yang Mulia.

**567. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:45]**

Ya.

**568. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:22:46]**

Jadi dibacakan, terus kemudian disandingkan dengan Sirekap, yang ada di Sirekap.

Nah, bila ada hal-hal yang tidak sesuai atau tidak sama, pada saat itulah saksi menyampaikan protes, saksi menyampaikan keberatan.

**569. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:03]**

Yang dijadikan acuan itu, yang di Plano atau di (...)

**570. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:23:06]**

C.Plano (...)

**571. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:11]**

Sirekapnya? Yang menyesuaikan itu Sirekapnya ke plano atau plano menyesuaikan Sirekap?

**572. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:23:16]**

Sirekap kan berdasarkan (...)

**573. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:20]**

Alat bantu kan, itu?

**574. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:23:21]**

Sirekapan adalah hasil kiriman dari ... apa namanya ... KPPS, ya.  
Nah, terus jadi C.Plano adalah dasar untuk dimasukkan ke Sirekap.

**575. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:35]**

Ya.

**576. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:23:36]**

Jadi ketika saksi, baik saksi partai, saksi PPWP maupun DPD, tidak sesuai datanya yang ada di si rekap, maka acuannya adalah di C.Plano (...)

**577. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:48]**

Plano?

**578. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:23:49]**

Plano.

**579. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:49]**

Ya.

**580. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:23:50]**

Nah, itu (...)

**581. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:50]**

Terus?

**582. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:23:51]**

Itu, berlangsung, Yang Mulia, sampai dengan selesai penghitungan per apa ... per Paslon atau per DPR atau DPD. Nah, kembali kita sampaikan ke para saksi, para-para saksi Panwas terkait dengan data yang ada di Sirekap.

Nah, kalau sudah sama semua datanya, sudah sesuai ... sesuai semua datanya yang ada di Sirekap, yang ... apa ... yang di apa ... yang

berasal dari C.Plano, maka bersama-sama saksi kita save data yang ada di Sirekap.

**583. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:30]**

Ya itu prosedurnya, sekarang saya terakhir saya potong supaya cepat.

**584. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:24:33]**

Ya.

**585. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:36]**

Di satu Kecamatan Cilincing, Patai NasDem dapat berapa suaranya?

**586. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:24:45]**

36.369, Yang Mulia.

**587. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:51]**

369.

**588. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:24:54]**

Demokrat.

**589. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:56]**

Demokrat berapa?

**590. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:24:57]**

15.602, Yang Mulia.

**591. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:01]**

602?

**592. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:25:02]**

Ya.

**593. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:04]**

Oke, ini Demokrat, ya. Yang ini saja, yang lain nanti kita bisa anu untuk kepentingan permohonan ini saja. Ini NasDem 6 ... 36.369. Ya, itu ada ... ada yang jumlahnya tadi 36.124, kok keliru kenapa itu? Tadinya kan waktu rekap yang pertama 36.124, terus setelah yang terakhir 36.369, yang betul yang mana itu?

**594. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:25:37]**

Ya, Yang Mulia. Jadi setelah kami melakukan (...)

**595. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:40]**

Koreksi (...)

**596. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:25:40]**

Rekapitulasi keseluruhan.

**597. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:43]**

Ya.

**598. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:25:43]**

Terus kemudian kami kembali membacakan yang ... yang sudah di apa ... di rekap ini (...)

**599. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:51]**

Ya.

**600. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:25:52]**

Lalu kemudian itulah yang kami tanda tangani oleh seluruh termasuk saksi (...)

**601. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:59]**

Tapi saksi Demokrat enggak tanda tangan, kan?

**602. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:26:02]**

Ya, saksi Demokrat tidak tanda tangan (...)

**603. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:04]**

Yang tidak tanda tangan selain Demokrat, partai apa?

**604. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:26:09]**

Hampir semuanya tanda tangannya, Yang Mulia.

**605. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:11]**

Hampir semua, tapi Demokrat jelas tidak, ya (...)

**606. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:26:12]**

Cuma Demokrat saja yang tidak tanda tangannya, Yang Mulia.

**607. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:15]**

Oke, terus punya C-1 Plano-nya berapa hasilnya? Sama, itu C-1 Plano dan D-1-nya, sama?

**608. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:26:27]**

Ya, yang tadi 36.000 itu, Yang Mulia.

**609. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:30]**

36.369 itu ... itu C-1-nya juga segitu.

**610. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:26:34]**

Itu yang ... itu yang kita ambil dari D.Hasil Plano, Yang Mulia, yang kita bacakan juga, yang sudah kita tandatangani (...)

**611. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:41]**

Itu dari C ... C.Hasil, kan? Dari C.Hasil dituangkan ke D.Hasil kan? Mana dulu itu?

**612. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:26:50]**

Yang kita bacakan saat rapat itu kan adalah D.Hasil Plano, Yang Mulia.

**613. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:56]**

Enggak, itu diambil over dari mana? Bisa ketemu D.Hasil itu dari mana?

**614. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:27:04]**

Ya, yang direkap permasing-masing perkelurahan, Yang Mulia.

**615. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:08]**

Nah, ya (...)

**616. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:27:08]**

Ya.

**617. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:09]**

Itu kan dari C.Hasil, kan?

**618. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:27:12]**

Ya, C.Hasil (...)

**619. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:13]**

Sekarang masih punya C.Hasilnya?

**620. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:27:16]**

C.Hasil, kami bawa D.Hasil, Yang Mulia.

**621. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:19]**

Enggak, saya yang bertanya, C.Hasilnya masih ada yang di dalam kotak?

**622. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:27:24]**

Ada, Yang Mulia. C.Hasilnya (...)



**623. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:25]**

Ada, toh? KPU? Provinsi? Ada? Ada, ya? Kenapa yang disampaikan ke sini kita minta C.Hasil kok enggak di ... C.Plano kok enggak dikasih?

**624. SAKSI TERMOHON: DODY WIJAYA [01:27:40]**

Masih sedang dipersiapkan Pak, karena apa namanya (...)

**625. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:42]**

Ya, kita memerlukan itu.

**626. SAKSI TERMOHON: DODY WIJAYA [01:27:44]**

Ya.

**627. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:45]**

Ya. Sekarang dibawa, enggak? Jadi begini lho, ini kita sudah nyandingkan ini, di seluruh Jakarta Utara, Cilincing, Sukapura, sampai Semper Barat kita sandingkan. Jadi sebelum sidang sudah kita sandingkan. Pada waktu penyandingan, ya. Ini kita dalilnya, menurut dalil Pemohon, misalnya TPS 1 Cilincing=53, dalilnya Pemohon, ada penambahan NasDem=53.

Terus kita lihat dari Bawaslu, Bawaslu menyandingkan Demokrat=10, NasDem hanya 20. Tapi tadi yang C-1 anunya, yang di anu permohonannya 53. Ternyata Termohon Partai NasDem menjadi 73, D-1-nya. Berarti apa yang didalilkan kalau ada penambahan 53, ini harus kita cek di C.Plano-nya. Nah, C.Plano-nya belum sampai ke sini, nah ini belum harus itu, ya harus dibawa ke sini. Karena data autentik yang benar adalah di C.Plano. Saya juga tidak percaya dengan C.Salinan yang dipunyai Pemohon. Saya juga tidak percaya C-1 Salinan dari Pihak Terkait. Saya juga kurang yakin meskipun Pak Putu Artha mengatakan Bawaslu otoritas negara pasti benar, juga belum tentu. Tapi di sini bukti yang diajukan oleh Bawaslu, Partai NasDem=73, padahal menurut Pemohon ada penambahan 53. Lah, ini ada 20, jadi kenapa di 20? Di D1-nya menjadi 73, berarti ada penambahan 53. Dalilnya betul, tapi kita juga belum yakin, karena kita akan melihat C.Planonya yang betul itu di mana. Nah, C.Planonya sampai hari ini belum dijadikan bukti oleh Termohon. Ya, karena apa? Bawaslu ngomong, NasDem itu 73. Hasilnya ini, nah itu kita cocokkan nanti. Nah, cocokkan itu sejumlah 1.136.

Tapi kalau kita misalnya tidak mampu untuk itu, nanti ada putusan bagaimana harus kita ambil putusan.

Silakan, Prof. Silakan, Prof.

**628. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:31:08]**

Begini, dari Termohon, C.Hasil atau Planonya dibawa sekarang?

**629. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:16]**

Belum.

**630. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:31:16]**

Ada di bawah?

**631. SAKSI TERMOHON: DODY WIJAYA [01:31:18]**

Belum, Prof.

**632. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:19]**

Eggak tegas, ini dijawab yang tegas, gitu lho.

**633. SAKSI TERMOHON: DODY WIJAYA [01:31:20]**

Belum, Yang Mulia.

**634. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:31:21]**

Belum dibawa?

**635. SAKSI TERMOHON: DODY WIJAYA [01:31:22]**

Belum.

**636. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:31:22]**

Belum dibawa. Persoalannya saya melanjutkan dari Ketua Panel. Ini data memang kami sengaja sandingkan. Jadi yang tadi disebutkan, data dari NasDem misalnya di TPS 1 Cilincing, yang ada selisih 53, itu menggunakan D.Hasil, ya kan? Saksi, D.Hasil yang dipakai, ya. Hanya D.Hasil semata sehingga NasDem=73, Demokrat=10. Tapi dari Bawaslu, ini yang Bawaslu itu adalah NasDemnya=20, kemudian dari Demokrat=10, kan begitu? Ini saya cocokkan dari Keterangan yang disampaikan pada waktu yang lalu ini, keterangan dari NasDem juga. Keterangan dari ... apa namanya ... Bawaslu. Menggunakan C Salinan disini, betul, kan? Nah ini menggunakan C.Salinan, Bawaslu

menggunakan C.Salinan, hasilnya adalah Demokrat=10, NasDemnya=20. Dari KPU itu menggunakan D.Hasil (...)

**637. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:22]**

D.Hasil.

**638. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:32:22]**

Hasilnya Demokrat=10, NasDemnya=73. Kalau Pemohon sama dengan (...)

**639. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:30]**

Bawaslu.

**640. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:32:31]**

Bawaslu. Nah, saya cocokan tiganya ini sekarang, tiga kami tampilkan dalam tabel, gitu.

**641. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:35]**

Gampang sekali (...)

**642. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:32:36]**

Ya.

**643. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:37]**

Kita cari sebetulnya.

**644. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:32:38]**

Hanya yang tidak ada itu kuncinya, yaitu C.Hasil (...)

**645. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:42]**

Plano.

**646. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:32:43]**

Yang asli plano. Nah, itu tolong nanti bisa ... apa namanya ... disegerakan itu, ya. Dan ini saya juga sekaligus ini, mohon izin, Pak Ketua.

**647. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:50]**

Silakan, Prof.

**648. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:32:51]**

Ini yang di Bawaslu ... apa Namanya ... ada yang kurang kelihatannya di tabel ini, ya. Tidak semua dimunculkan, ya. Ya, harusnya kan tadi 233 TPS. Ini ada beberapa TPS yang saya lihat masih kosong hasilnya. Tapi semuanya menggunakan C.Hasil. Ini sudah diberikan buktinya, ya, untuk C.Hasilnya.

Oke, terima kasih.

**649. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:14]**

Ya, terima kasih.

Jadi begitu, ya, Pak Arfah, saya kira sudah jelas. Cukup, ya, untuk Pak Arfah, karena yang diperlukan kita itu C.Planonya, ya, untuk Kecamatan Clincing. Ini Pak Arfah, ya, kan? Saya kira cukup. Jadi apa yang disampaikan, D-nya itu 3.000 ... 36.369. Kemudian nas ... Demokratnya 15.602, kita semuanya belum yakin, karena kita memerlukan buktinya C-1 Plano. Nah, C-1 Plano harus segera dihadirkan, ya. Terima kasih, Pak Arfah.

Sekarang siapa?

**650. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [01:33:59]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**651. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:04]**

Pak, Siapa sekarang?

**652. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:34:05]**

Pak Sudirman, Yang Mulia.

**653. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:06]**

Pak Sudirman, yang mana? Pak Sudirmannya dua tadi, Pak Sudirman yang mana? Ya, Pak Sudirman. Pak Sudirman, di mana? Clincing, juga?

**654. SAKSI TERMOHON: SUDIRMAN [01:34:17]**

Cilincing, Yang Mulia.

**655. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:18]**

Apa yang mau disampaikan? Yang disampaikan, Pak ... anu, kan sama berarti sama dengan Pak Arfah tadi, kan?

**656. SAKSI TERMOHON: SUDIRMAN [01:34:24]**

Hampir sama sih.

**657. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:25]**

Ya sama. Kita hanya butuh C-1 Plano, ya, untuk Kecamatan Clincing dan seterusnya, sejumlah 1.000 ... berapa tadi? 134 TPS.

**658. SAKSI TERMOHON: SUDIRMAN [01:34:41]**

Izin, Yang Mulia.

**659. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:42]**

Apa yang mau disampaikan?

**660. SAKSI TERMOHON: SUDIRMAN [01:34:43]**

Saya menyampaikan hanya proses rekapitulasi yang di kecamatan.

**661. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:48]**

Ya, protes gimana? Apa yang diprotes (...)

**662. SAKSI TERMOHON: SUDIRMAN [01:34:43]**

Izin, Yang Mulia (...)

**663. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:48]**

Prosesnya gimana? Enggak, kita sudah tahu prosesnya, ya. Tapi kita tinggal sekarang mencocokkan C dengan C-1 Plano-nya, ya. Cukup, ya, saya kira, ya.

**664. SAKSI TERMOHON: SUDIRMAN [01:34:49]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**665. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:50]**

Karena kuncinya sudah ketemu kita.  
Terus Pak Abie Maharullah Madugiri, ini KPU Jakarta yang perlu saya tanya. Apakah Partai Demokrat waktu rekapitulasi di tingkat Kota Jakarta Utara tanda tangan? Silakan berdiri. Ya.

**666. SAKSI TERMOHON: ABIE MAHARULLAH MADUGIRI [01:35:30]**

Mohon izin, Yang Mulia.

**667. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:31]**

Ya.

**668. SAKSI TERMOHON: ABIE MAHARULLAH MADUGIRI [01:34:32]**

Tidak tanda tangan.

**669. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:33]**

Tidak tanda tangan.  
Tapi kalau NasDem tanda tangan, ya.

**670. SAKSI TERMOHON: ABIE MAHARULLAH MADUGIRI [01:34:36]**

NasDem, tanda tangan.

**671. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:37]**

Yang partai lain?

**672. SAKSI TERMOHON: ABIE MAHARULLAH MADUGIRI [01:34:38]**

Yang partai lain tanda tangan.

**673. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:39]**

Tanda tangan. Baik.

Terus ada apa di sana? Ada protes-protes? Betul yang disampaikan oleh Pemohon tadi? Bahwa dia protes tapi tidak ada realisasi, tidak ada ... anu, sampai ke tingkat provinsi?

**674. SAKSI TERMOHON: ABIE MAHARULLAH MADUGIRI [01:34:55]**

Jadi begini, Yang Mulia. Ketika pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kota ... itu berlangsung tanggal 3 sampai dengan tanggal 5, lalu kemudian pada saat tanggal 4 itu kan Cilincing menjadi kecamatan terakhir, Yang Mulia?

**675. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:11]**

Ya.

**676. SAKSI TERMOHON: ABIE MAHARULLAH MADUGIRI [01:36:13]**

Nah, kebetulan memang ada miss sedikit ketika pelaksanaan rekapitulasi bahwa ada amplop yang tidak tersegel. Lalu kemudian juga ada keberatan-keberatan yang lainnya.

Nah, situasi tersebut ketika pelaksanaan rekapitulasi menimbulkan ... apa Namanya ... pertanyaan bagi orang-orang, maka kemudian terhadap hal tersebut kami menjelaskan tata cara dan prosedurnya terhadap hal tersebut. Lalu kemudian mentok kami kemudian minta pendapat Bawaslu.

Nah, kemudian pendapat Bawaslu pada saat itu adalah untuk terhadap keberatan hal itu agar dikembalikan kembali, dari tanggal 5 itu dikembalikan kembali di Kecamatan Cilincing untuk diulang di sana.

**677. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:59]**

Ya.

**678. SAKSI TERMOHON: ABIE MAHARULLAH MADUGIRI [01:36:59]**

Nah setelah itu, sudah di sana diulang kemudian disegel kembali amplopnya lalu kemudian, dibawa lagi ke kota. Nah, terhadap hal tersebut juga kami meminta perpanjangan waktu karena sudah di luar batas waktu pleno kota, kami minta rekomendasi Bawaslu dan juga minta izin kepada KPU Provinsi untuk permohonan penambahan waktu sampai tanggal 6. Lalu kemudian, di tanggal 6 ada keberatan juga dari Partai Demokrat terkait C.Hasil namun kami menyampaikan terhadap

keberatan itu, kami menyampaikan tata cara dan prosedur bahwa kami sampaikan penyandingan data di kota itu adalah berdasarkan D kecamatan.

Maka C-1 ... data C itu letaknya adalah di kecamatan. Setelah kami sampaikan ternyata masih ada keberatan, Yang Mulia. Lalu berdasarkan hal tersebut kami kembali meminta pendapat Bawaslu, terhadap hal tersebut. Nah, pendapat Bawaslu pada saat itu disampaikan secara lisan bahwa mengiyakan terhadap argumentasi kami, lalu kemudian naik saja ke level provinsi karena juga tenggat waktu yang sudah diperpanjang, gitu.

Lalu kemudian, disampaikan kembali kepada Bawaslu bahwa jika ada dugaan pelanggaran dan lain-lain sebagainya silakan dilaporkan saja ke Bawaslu. Artinya prosedur ... secara proses dan prosedur telah kami laksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**679. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:34]**

Ya.

**680. SAKSI TERMOHON: ABIE MAHARULLAH MADUGIRI [01:38:35]**

Kurang lebih begitu, Yang Mulia.

**681. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:36]**

Ya. Cukup, ya.

**682. SAKSI TERMOHON: ABIE MAHARULLAH MADUGIRI [01:38:37]**

Terima kasih.

**683. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:38]**

Terima kasih.

Jadi ini kita minta, untuk itu dihadirkan C.Plano, ya.

C.Plano, ya karena, ya karena apa? Karena dari Pemohon itu tadi contohnya cili ..., misalnya Cilincing TPS 2, Cilincing.

Menurut Pemohon dalilnya ada penambahan untuk suara NasDem=35. Kemudian menurut Termohon, Partai NasDem TPS 2 mendapat 81.

Tapi menurut Bawaslu itu 46. Jadi ada selisih 35 suara penambahannya, ya. Sehingga satu-satunya jalan untuk ngecek itu dibutuhkan C.Plano. Ya, karena apa? Karena ternyata di C sama dengan di D itu tidak konsisten, tidak sama, ya.



Terakhir Pak Dody, saya persilahkan apa yang akan disampaikan.

**684. SAKSI TERMOHON: DODY WIJAYA [01:39:55]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Izinkan kami memberikan Keterangan dan kesaksian bahwa dalam proses rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang, jajaran penyelenggara dari tingkat bawah, sampai tingkat provinsi, telah mempedomani ketentuan peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024

**685. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:11]**

Ya, itu kan normatifnya.

**686. SAKSI TERMOHON: DODY WIJAYA [01:40:13]**

Di mana ... izin, Yang Mulia, terkait dengan rekapitulasi di kecamatan terkait dengan ketentuan Pasal 16 ayat (6), apabila terjadi pernyandingan data kami mempersilakan saksi dan Panwascam untuk mencocokkan data dalam formulir yang dimiliki C.Hasil Salinan dengan data pada formulir C.Hasil Plano dan data dalam Sirekap. Apabila terjadi pembetulan, maka dilakukan pembetulan seketika pada Sirekap. Artinya koreksi data, itu dilakukan koreksi melalui data di dalam Sirekap, artinya kalau kenapa kami belum menghadirkan C.Plano karena proses di setiap tingkatan itu, dilakukan secara terbuka, disaksikan oleh semua saksi, diawasi oleh pengawas pemilu.

**687. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:04]**

Ya, tapi begini.

**688. SAKSI TERMOHON: DODY WIJAYA [01:41:06]**

Ya.

**689. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:07]**

Saya potong, jadi Sirekap itu kan hanya alat bantu.

**690. SAKSI TERMOHON: DODY WIJAYA [01:41:10]**

Betul.

**691. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:11]**

Jadi kita tidak bisa yang ada di Sirekap untuk dijadikan pedoman, yang dijadikan pedoman adalah C-1 yang genuine, C.Hasil yang genuine. C.Hasil yang genuine adalah C-1 Plano, yang ada di dalam kotak yang disegel secara rahasia.

Sekarang saya tanya ke Pak Dody.

**692. SAKSI TERMOHON: DODY WIJAYA [01:41:33]**

Ya.

**693. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:34]**

Pada waktu pleno di sana, itu Pak Firmansyah, hadir enggak?

**694. SAKSI TERMOHON: DODY WIJAYA [01:41:3]**

Hadir, sebagai saksi dari Partai Demokrat, Pak.

**695. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:42]**

Hadir. Betul, Pak Firmansyah hadir? Ketemu?

**696. SAKSI TERMOHON: DODY WIJAYA [01:41:45]**

Betul, hadir. Ketemu Pak.

**697. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:47]**

Terus, Pak Firmansyah tanda tangan atau tidak?

**698. SAKSI TERMOHON: DODY WIJAYA [01:41:48]**

Tidak tanda tangan.

**699. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:49]**

Tidak tanda tangan, selesai.

Ya, ada lagi yang akan disampaikan?

**700. SAKSI TERMOHON: DODY WIJAYA [01:41:55]**

Betul, Yang Mulia. Bahwa, keberatan disampaikan, kemudian ada 2 cara KPU melakukan tindak lanjut terhadap keberatan.

**701. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:02]**

Ya.

**702. SAKSI TERMOHON: DODY WIJAYA [01:42:03]**

Satu, Menjelaskan tata cara prosedur.

**703. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:06]**

Ya.

**704. SAKSI TERMOHON: DODY WIJAYA [01:42:07]**

Atau kami minta rekomendasi Bawaslu.

**705. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:08]**

Ya.

**706. SAKSI TERMOHON: DODY WIJAYA [01:42:09]**

Kami sudah menjelaskan tata cara dan prosedur sesuai ketentuan Undang-Undang 7/2017 di Pasal 380. Bahwa terhadap perselisihan hasil, di tingkat provinsi, maka yang dijadikan acuan adalah sertifikat hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota. Permintaan dari saksi saat itu adalah rekapitulasi suara ulang, Yang Mulia. Nah, ketentuan rekapitulasi suara ulang, itu termaktub di dalam Pasal 376, hanya jika memenuhi beberapa kriteria. Salah satunya kerusuhan, rekapitulasi akan tertutup karena tidak memenuhi ketentuan (...)

**707. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:43]**

Ya, jadi begini pihak KPU Provinsi, sudah betul tidak melakukan apa yang diminta oleh Pak Firmansyah, tapi beliau itu masih menjadi ... apa, belum puas.

**708. SAKSI TERMOHON: DODY WIJAYA [01:42:54]**

Ya.

**709. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:55]**

Maka Pemohon mendalilkan, kemudian mengajukan permohonannya MK, ya?

**710. SAKSI TERMOHON: DODY WIJAYA [01:42:54]**

Ya.

**711. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:01]**

Sebagai upaya untuk, mencari kebenaran materiil, bukan kebenaran prosedural, itu ya.

**712. SAKSI TERMOHON: DODY WIJAYA [01:43:08]**

Baik.

**713. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:09]**

Ada lagi yang ingin ditambahkan? Cukup, ya?

**714. SAKSI TERMOHON: DODY WIJAYA [01:43:11]**

Cukup, Yang Mulia.

**715. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:12]**

Baik.

Sekarang kita ke saksi dari ... gimana, Prof? Pak Sudirman, 1 lagi, apa? gimana Pak Sudirman, 1 lagi?

**716. SAKSI TERMOHON: SUDIRMAN [01:43:27]**

Izin, Yang Mulia.

**717. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:29]**

Ya, Pak Sudirman.

**718. SAKSI TERMOHON: SUDIRMAN [01:43:30]**

Saya hanya mau menambahkan dari teman-teman PPK yang tadi.

**719. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:31]**

Ya.

**720. SAKSI TERMOHON: SUDIRMAN [01:43:32]**

Yang pertama bahwa, yang disampaikan tadi Saudara Saksi dari pihak Pemohon pada tanggal 5. Bahwa dia melakukan keberatan. Yang pertama, saudara tidak membawa bukti-bukti pada saat itu (...)

**721. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:50]**

Oke, ya. Tidak ada buktinya.

**722. SAKSI TERMOHON: SUDIRMAN [01:43:52]**

Dan ... dan menyampaikan hanya secara umum.

**723. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:56]**

Oke.

**724. SAKSI TERMOHON: SUDIRMAN [01:43:57]**

Tidak menyebutkan angka yang berubah dimana pergeserannya dan partai apa. Dia hanya menyatakan bahwa ada indikasi ... penambahan suara, itu yang pertama.

**725. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:06]**

Oke. Ya.

**726. SAKSI TERMOHON: SUDIRMAN [01:44:08]**

Yang kedua, Yang Mulia. Bahwa TPS-TPS yang diajukan oleh Pemohon yang berjumlah 200 lebih itu, tidak disampaikan kepada kita pada saat rekapitulasi. Jadi kita juga pada (...)

**727. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:25]**

Ya.

**728. SAKSI TERMOHON: SUDIRMAN [01:44:26]**

Saat tidak (...)

**729. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:26]**

Jadi (...)

**730. SAKSI TERMOHON: SUDIRMAN [01:44:27]**

Melakukan tindakan.

**731. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:28]**

Di sana, di Anda pada waktu Anda baik di tingkat PPK, tingkat KPU Jakarta Utara maupun tingkat provinsi itu didasarkan pada mencari, yang dicari adalah prosedurnya.

**732. SAKSI TERMOHON: SUDIRMAN [01:44:43]**

Siap, Yang Mulia.

**733. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:43]**

Kalau ada pokok keberatan, mana buktinya dan sebagainya-sebagainya.

**734. SAKSI TERMOHON: SUDIRMAN [01:44:47]**

Siap, Yang Mulia.

**735. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:47]**

Ya kan hanya itu. Tapi Mahkamah bisa mengu ... apa ... mencari keadilan tidak hanya sekedar prosedural, tapi keadilan yang substantif. Makanya sekarang sudah mau dibuka begitu, ya.

Tapi Anda juga tidak keliru karena prosedurnya memang begitu. Kalau enggak ada, ya enggak bisa.

**736. SAKSI TERMOHON: SUDIRMAN [01:45:07]**

Siap, Yang Mulia.

**737. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:07]**

Ya. Tapi kalau Mahkamah kemudian bisa meminta sampai ke ... apa ... C-1 Planonya ada, enggak? Ada? Kita lihat nanti, ya. Ya cukup, ya.

**738. SAKSI TERMOHON: SUDIRMAN [01:45:18]**

Siap, Yang Mulia.

**739. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:19]**

Jadi, memang Anda juga tidak salah karena prosedurnya kalau protes harus ada buktinya.

**740. SAKSI TERMOHON: SUDIRMAN [01:45:24]**

Siap, Yang Mulia.

**741. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:24]**

Ya. Cukup, ya, Pak Sudirman.

Terus sekarang ke Saksi dari Pihak Terkait, dari NasDem. Silakan dari NasDem, Pak Sahir terlebih dahulu.

**742. SAKSI PIHAK TERKAIT: SAHIR KAIMUDIN [01:45:43]**

Baik, terima kasih.

**743. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:45]**

Pak Sahir, gimana Pak Sahir?

**744. SAKSI PIHAK TERKAIT: SAHIR KAIMUDIN [01:45:49]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**745. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:50]**

Ya.

**746. SAKSI PIHAK TERKAIT: SAHIR KAIMUDIN [01:45:51]**

Perkenalkan saya Sahir Kaimudin, Saksi dari Partai Golkar. Saya juga kebetulan Ketua Partai Golkar Kecamatan Cilincing.

**747. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:00]**

Oke.

**748. SAKSI PIHAK TERKAIT: SAHIR KAIMUDIN [01:46:00]**

Yang dimandatkan jadi saksi di (...)

**749. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:03]**

Mandat di Cilincing (...)

**750. SAKSI PIHAK TERKAIT: SAHIR KAIMUDIN [01:46:04]**

PPK Kecamatan Cilincing.

**751. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:05]**

Ya, gimana?

**752. SAKSI PIHAK TERKAIT: SAHIR KAIMUDIN [01:46:07]**

Kalau boleh saya ingin jelaskan proses awal sampai akhir. Karena saya ada di situ (...)

**753. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:13]**

Ya.

**754. SAKSI PIHAK TERKAIT: SAHIR KAIMUDIN [01:46:14]**

Diperkenankan oleh, Yang Mulia. Saya ingin jelaskan.

**755. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:16]**

Silakan ... silakan

**756. SAKSI PIHAK TERKAIT: SAHIR KAIMUDIN [01:46:19]**

Mohon izin, Yang Mulia.

Pelaksanaan itu dari tanggal 16 sampai tanggal 3 yang kami lakukan, yaitu mulai dari TPS 01 yang dibuka pertama itu adalah kelas dari Marunda. Ketika kita ... melakukan suatu ... proses penghitungan dari TPS, katakan dari TPS pertama sampai akhir itu. Ketika kita temukan suatu permasalahan, maka saya dari Partai Golkar dan juga dari saksi dari partai lain juga dari DPD dan Presiden. Ikut bersama-sama memprotes tentang persoalan yang kita indikasi ada ... per ... perbedaan suara.

Artinya di sini untuk mensinkronkan. Mensinkronkan. Lalu di situ juga disaksikan oleh Panwas Kecamatan. Kita saksikan bersama-sama. Yang jadi permasalahan, kita kan sudah lalui dari tahap pertama sampai tahap akhir. Memang persoalan protes demi protes ada. Tetapi langsung kita lakukan ... apa ... klarifikasi. Sebenarnya permasalahannya di mana



ini? Setelah kita anggap sudah klir. Oh, ini hanya karena ada permasalahan ini, permasalahan itu, lalu dibuatkan BAP. Nah, kita lalui itu dari tanggal 16 sampai tanggal 3, itu sudah melalui proses yang menurut saya secara prosedur sudah. Di tanggal 4, yang seharusnya itu kita lakukan tapi ada diundur oleh ketua PPK dengan dasar yang tadi sudah dijelaskan. Sehingga kita lakukan di tanggal 5. Itu baru muncul ada suatu protes, mohon jujur ya, dari teman-teman kita, dari Demokrat. Ini saya kenal, ini sahabat kita juga, kawan-kawan juga (...)

**757. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:46]**

Ya.

**758. SAKSI PIHAK TERKAIT: SAHIR KAIMUDIN [01:48:46]**

Di PPK, mereka kenal, saya kenal.

**759. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:46]**

Kita ... kita bersaudara, sama sama keketurunan Nabi Adam.

**760. SAKSI PIHAK TERKAIT: SAHIR KAIMUDIN [01:48:51]**

Lho, saya sampaikan, Yang Mulia, jujur saya agak sedikit keras. Saya bilang kenapa proses dari awal sampai di tanggal 3 kalian tidak melakukan suatu protes? Kalau memang itu ada permasalahan, kenapa tidak protes dari awal? Di mana sebenarnya ini ... misalnya kalian dirugikan? Nah, ini ... ini yang jadi ... jadi pertanyaan ini. Nah, saya ... jujur saya, ini sama Bapak sono saya ... karena saya sempat lawan Bapak itu. Sebagai ... ya, kan? Ya. Eh Bapak, ini ... karena ini jujur kita bicara Pak, bahwa (...)

**761. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:34]**

Ya. ini waktunya ... waktunya terbatas, Pak. Waktunya terbatas.

**762. SAKSI PIHAK TERKAIT: SAHIR KAIMUDIN [01:49:37]**

Oke, saya sampaikan begitu. Itu ... itu yang saya sampaikan. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya ada permasalahan perbedaan suara, jujur Partai Golkar tidak akan mungkin menandatangani itu. Karena perintah dari Partai Golkar, ketika ada perbedaan suara, jangan mau menandatangani.

**763. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:56]**

Oke.

**764. SAKSI PIHAK TERKAIT: SAHIR KAIMUDIN [01:49:57]**

Ya.

**765. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:57]**

Jadi (...)

**766. SAKSI PIHAK TERKAIT: SAHIR KAIMUDIN [01:49:58]**

Kami, saya ... jadi sehingga kami klir, saya anggap sudah selesai, klir, maka saya tandatanganai.

**767. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:03]**

Oke, dari sisi Partai Gokar tidak ada persoalan?

**768. SAKSI PIHAK TERKAIT: SAHIR KAIMUDIN [01:50:07]**

Tidak ada.

**769. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:08]**

Ya, cukup. Oke.

Terus sekarang berikutnya, pak ... Bu Suci Lestari. Di mana? Itu sudah ada, Mahkamah kaya, Pak, asetnya, miknya.

Ya, itu tidak bisa diwakilkan, silakan.

**770. SAKSI PIHAK TERKAIT: R. SUCI LESTARI [01:50:29]**

Izin, Yang Mulia.

**771. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:329]**

Ya.

**772. SAKSI PIHAK TERKAIT: R. SUCI LESTARI [01:50:30]**

Saya Suci Lestari, da ... saksi dari Partai PKB yang bermandat.

**773. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:35]**

Ya.

**774. SAKSI PIHAK TERKAIT: R. SUCI LESTARI [01:50:38]**

Terus terang saya mengikuti proses dari awal sampai akhir, kita tidak ada perselisihan, maksudnya bila ada perselisihan, hari itu pun kita selesai.

**775. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:51]**

Ya.

**776. SAKSI PIHAK TERKAIT: R. SUCI LESTARI [01:50:52]**

Ya. Dan proses ... protes terakhir pada saat D-1.

**777. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:59]**

Ya, jadi PKB juga tanda tangan, ya?

**778. SAKSI PIHAK TERKAIT: R. SUCI LESTARI [01:51:02]**

Ya.

**779. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:03]**

Oke. Jadi di tingkat itu tanda tangan, tingkat rekapitulasi (...)

**780. SAKSI PIHAK TERKAIT: R. SUCI LESTARI [01:51:08]**

Ya.

**781. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:08]**

Di tingkat (...)

**782. SAKSI PIHAK TERKAIT: R. SUCI LESTARI [01:51:09]**

Ya.

**783. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:00]**

Anu ... itu ... kota ... apa ... Kecamatan Cilincing?

**784. SAKSI PIHAK TERKAIT: R. SUCI LESTARI [01:51:12]**

Di tingkat kecamatan, ya.

**785. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:13]**

Tingkat ... Tanda tangan, ya Anda?

**786. SAKSI PIHAK TERKAIT: R. SUCI LESTARI [01:51:14]**

Tanda tangan.

**787. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:14]**

Oke.

**788. SAKSI PIHAK TERKAIT: R. SUCI LESTARI [01:51:15]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

**789. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:16]**

Terus, tapi untuk yang Demokrat tidak tanda tangan?

**790. SAKSI PIHAK TERKAIT: R. SUCI LESTARI [01:51:20]**

Oh, tidak.

**791. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:21]**

Tidak?

**792. SAKSI PIHAK TERKAIT: R. SUCI LESTARI [01:51:22]**

Ya.

**793. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:22]**

Apa lagi yang ingin disampaikan, Bu Suci?

**794. SAKSI PIHAK TERKAIT: R. SUCI LESTARI [01:51:24]**

Sudah begitu saja.

**795. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:25]**

Cukup, ya?

**796. SAKSI PIHAK TERKAIT: R. SUCI LESTARI [01:51:25]**

Ya. Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

**797. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:26]**

Baik. Sekarang, Bu Lis. Silakan. Diturunkan supaya pas, gitu. Silakan.

**798. SAKSI PIHAK TERKAIT: LIS MIANI [01:51:34]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin.

**799. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:38]**

Bu Lis, saksi mandat dari mana?

**800. SAKSI PIHAK TERKAIT: LIS MIANI [01:51:42]**

Saya saksi mandat dari Partai Amanat Nasional.

**801. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:45]**

Oh, dari PAN. Gimana menurut, Ibu?

**802. SAKSI PIHAK TERKAIT: LIS MIANI [01:51:48]**

Baik. Yang saya ketahui, saya memang mengikuti proses rekapitulasi dari awal ... ngikut ... mengikuti proses penghitungan suara di tingkat kecamatan. Dan yang saya ketahui dari awal sampai akhir memang benar dengan apa yang sudah dikatakan, Pak Sahir, tadi.

**803. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:06]**

Ya.

**804. SAKSI PIHAK TERKAIT: LIS MIANI [01:52:07]**

Dari awal pun ketika ada permasalahan, kita bersama-sama untuk langsung mengoreksi PPK.

**805. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:15]**

Ya.

**806. SAKSI PIHAK TERKAIT: LIS MIANI [01:52:15]**

Karena di saat itu juga ketika ada permasalahan, kita komplain. Jadi, tidak bisa ditunda untuk besok.

**807. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:21]**

Ya.

**808. SAKSI PIHAK TERKAIT: LIS MIANI [01:52:22]**

Jadi, memang hari itu diselesaikan. Ketika kemudian ... ketika di akhir dan waktu itu, saya sudah mendapat dari, Bapak Ketua PPK di hari tanggal 6 itu untuk mengambil D.Hasil. Tapi di saat itu (...)

**809. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:40]**

Untuk partai, Ibu, enggak ada masalah, ya?

**810. SAKSI PIHAK TERKAIT: LIS MIANI [01:52:40]**

Tidak ada.

**811. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:42]**

Perolehan suaranya, ya? Tapi perolehan suara Partai Demokrat, Ibu juga enggak tahu kan?

**812. SAKSI PIHAK TERKAIT: LIS MIANI [01:52:48]**

Tidak tahu Pak, karena saya hanya fokus dengan partai saya, saja.

**813. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:48]**

Oke, ya? Baik. Terima kasih. Ada lagi, Bu Lis? Cukup, ya?

**814. SAKSI PIHAK TERKAIT: LIS MIANI [01:52:56]**

Cukup, Yang Mulia dari saya. Terima kasih.

**815. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:57]**

Terima kasih, Bu Lis. Saya kalau dengan Ibu-ibu lembut, saya. Bu Sinta, silakan, ada?

**816. SAKSI PIHAK TERKAIT: SINTA PERMANASARI [01:53:11]**

Baik, Yang Mulia, saya Ibu Sinta.

**817. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:18]**

Silakan, Bu Sinta.

**818. SAKSI PIHAK TERKAIT: SINTA PERMANASARI [01:53:20]**

Baik, saya (...)

**819. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:21]**

Bu Sinta, Saksi mandat dari partai?

**820. SAKSI PIHAK TERKAIT: SINTA PERMANASARI [01:53:22]**

Saya saksi mandat dari DPD, independent.

**821. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:27]**

Oh, independent.

**822. SAKSI PIHAK TERKAIT: SINTA PERMANASARI [01:53:28]**

Nomor 4, Bapak H. Achmad Azran.

**823. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:31]**

Oke.

**824. SAKSI PIHAK TERKAIT: SINTA PERMANASARI [01:53:32]**

Jadi, kebetulan saya duduk di sini sebagai Saksi dan saya sudah disumpah, Yang Mulia.

**825. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:39]**

Ya.

**826. SAKSI PIHAK TERKAIT: SINTA PERMANASARI [01:53:41]**

Saya hanya akan menceritakan apa yang saya, lihat.

**827. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:44]**

Ya, gimana, Ibu yang melihat apa?

**828. SAKSI PIHAK TERKAIT: SINTA PERMANASARI [01:53:49]**

Dari awal pembukaan (...)

**829. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:49]**

Ada penampakan di Cilincing?

**830. SAKSI PIHAK TERKAIT: SINTA PERMANASARI [01:53:50]**

Sampai diselesai rekapitulasi suara.

**831. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:55]**

Di tingkat Cilincing?

**832. SAKSI PIHAK TERKAIT: SINTA PERMANASARI [01:53:57]**

Tingkat di Kecamatan Cilincing (...)

**833. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:57]**

Kecamatan Cilincing.

**834. SAKSI PIHAK TERKAIT: SINTA PERMANASARI [01:53:58]**

Kebetulan saya, Saksi mandat di tingkat Cilincing sampai di tingkat kota pun saya menjadi Saksi mandat.

**835. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:06]**

Ya

**836. SAKSI PIHAK TERKAIT: SINTA PERMANASARI [01:54:07]**

Jadi, semua yang dikatakan, yang saya dengar juga dari kesaksian tingkat PPK Kecamatan Cilincing, Pak Farhan ya, itu semua



benar prosedurnya. Jadi, ketika ... ketika ada selisih angka dari Sirekap dengan lembar Pleno itu, ketika partai siapa yang misalnya selisih dikembalikan ke saksi mandat dari yang hadir. Ditanyakan apakah sudah benar atau belum sesuai dengan C-1 yang dimiliki saksi di TPS. Karena saya bicara begini, menjadi Saksi mandat saya di Bimtek. Jadi, tidak bisa sembarangan.

Nah, ketika ada selisih pihak dari PPK itu sudah mengembalikan, Yang Mulia, kepada saksi mandat yang hadir di saat penghitungan. Seharusnya kalau memang ada protes, setiap saksi itu sudah dibekali C-1 di TPS. Hasilnya yang di TPS (...)

**837. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:23]**

C-1 yang dibawa para Saksi itu C-1 Salinan, namanya.

**838. SAKSI PIHAK TERKAIT: SINTA PERMANASARI [01:54:27]**

Ya. Jadi (...)

**839. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:30]**

C-1 Salinan itu bisa beda-beda antara yang dibawa satu partai, partai lain (...)

**840. SAKSI PIHAK TERKAIT: SINTA PERMANASARI [01:54:33]**

Ya.

**841. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:34]**

Termasuk yang dibawa Ibu DPD itu, bisa beda.

**842. SAKSI PIHAK TERKAIT: SINTA PERMANASARI**

Baik, Pak (...)

**843. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:39]**

Tapi yang otentik adalah C-1-nya Plano.

**844. SAKSI PIHAK TERKAIT: SINTA PERMANASARI [01:54:42]**

Ya.

**845. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:43]**

Yang mempunyai satu plano itu hanya, KPU.

**846. SAKSI PIHAK TERKAIT: SINTA PERMANASARI [01:54:47]**

Ya.

**847. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:48]**

Gitu.

**848. SAKSI PIHAK TERKAIT: SINTA PERMANASARI [01:54:49]**

Baik, Yang Mulia. Ketika memang tidak ada penyelesaian, sering juga terjadi buka kotak.

**849. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:57]**

Ya.

**850. SAKSI PIHAK TERKAIT: SINTA PERMANASARI [01:54:58]**

Untuk membuka yang ada di kotak.

**851. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:02]**

Apa yang ada di kotak?

**852. SAKSI PIHAK TERKAIT: SINTA PERMANASARI [01:56:04]**

Misalkan selisih (...)

**853. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:05]**

Ya (...)

**854. SAKSI PIHAK TERKAIT: SINTA PERMANASARI [01:56:05]**

Dan ti (...)

**855. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:05]**

Yang ada di kotak, apa?

**856. SAKSI PIHAK TERKAIT: SINTA PERMANASARI [01:56:07]**

Per lembar ... apa namanya ... surat suara. Penghitungan (...)

**857. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:11]**

Oh (...)

**858. SAKSI PIHAK TERKAIT: SINTA PERMANASARI [01:56:11]**

Ulang (...)

**859. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:12]**

Penghitung ulang?

**860. SAKSI PIHAK TERKAIT: SINTA PERMANASARI [01:56:13]**

Ya, kadang-kadang (...)

**861. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:14]**

Ya (...)

**862. SAKSI PIHAK TERKAIT: SINTA PERMANASARI [01:56:14]**

Kami Saksi itu, sampai tengah malam pulang, Pak.

**863. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:17]**

Ya.

**864. SAKSI PIHAK TERKAIT: SINTA PERMANASARI [01:56:17]**

Kalau memang dari saksi yang merasa ada selisih, tetap bersikeras untuk membuka (...)

**865. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:24]**

Itu ada (...)

**866. SAKSI PIHAK TERKAIT: SINTA PERMANASARI [01:56:24]**

Kotak (...)

**867. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:24]**

Pada waktu dibuka, yang kotaknya dibuka itu, di TPS berapa?

**868. SAKSI PIHAK TERKAIT: SINTA PERMANASARI [01:56:29]**

Waktu itu ... karena sudah banyak ... sudah (...)

**869. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:32]**

Ibu kan, di tingkat (...)

**870. SAKSI PIHAK TERKAIT: SINTA PERMANASARI [01:56:32]**

Sudah lama (...)

**871. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:33]**

Kecamatan kan? Bukan? (...)

**872. SAKSI PIHAK TERKAIT: SINTA PERMANASARI [01:56:34]**

Saya di tingkat kecamatan (...)

**873. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:34]**

TPS kan? Waktu di (...)

**874. SAKSI PIHAK TERKAIT: SINTA PERMANASARI [01:56:36]**

Saya di tingkat kecamatan (...)

**875. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:36]**

Tingkat kecamatan, yang dibuka itu, dari TPS berapa? Cilincing?

**876. SAKSI PIHAK TERKAIT: SINTA PERMANASARI [01:56:41]**

Di Cilincing itu, kan 7 Kelurahan, ya, Yang Mulia.

**877. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:46]**

Ya, 7 Kelurahan.

**878. SAKSI PIHAK TERKAIT: SINTA PERMANASARI [01:56:47]**

7 Kelurahan (...)

**879. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:48]**

7 Kelurahan. 1 Kelurahan kan, berapa TPS kan?

**880. SAKSI PIHAK TERKAIT: SINTA PERMANASARI [01:56:52]**

Ya.

**881. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:52]**

Yang dibuka itu, apa? Yang dibuka itu, apa? Kotak suara di TPS?

**882. SAKSI PIHAK TERKAIT: SINTA PERMANASARI [01:56:56]**

Kotak suara terakhir itu, yang di Semper Barat.

**883. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:01]**

Semper (...)

**884. SAKSI PIHAK TERKAIT: SINTA PERMANASARI [01:57:02]**

Itu (...)

**885. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:02]**

Barat (...)

**886. SAKSI PIHAK TERKAIT: SINTA PERMANASARI [01:57:02]**

Menjelang rekapitulasi akhir. Sempat dibuka karena kan, ini sudah agak (...)

**887. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:08]**

Ya.

**888. SAKSI PIHAK TERKAIT: SINTA PERMANASARI [01:57:08]**

Lama, ya, Pak.

**889. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:08]**

Ya.

**890. SAKSI PIHAK TERKAIT: SINTA PERMANASARI [01:57:08]**

Yang Mulia. Jadi saya hanya me-review yang memang teringat saja (...)

**891. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:14]**

Teringat.

**892. SAKSI PIHAK TERKAIT: SINTA PERMANASARI [01:57:15]**

Dan di Rorotan pernah terjadi juga.

**893. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:18]**

Ya.

**894. SAKSI PIHAK TERKAIT: SINTA PERMANASARI [01:57:19]**

Di tingkat Cilincing pun sudah pernah terjadi. Cuma kalau untuk me-review TPS-nya, TPS berapa mohon (...)

**895. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:26]**

Sudah lupa (...)

**896. SAKSI PIHAK TERKAIT: SINTA PERMANASARI [01:57:26]**

Izin (...)

**897. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:26]**

Ya. Oke.

**898. SAKSI PIHAK TERKAIT: SINTA PERMANASARI [01:57:26]**

Sudah lupa, sayanya, Yang Mulia.

**899. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:30]**

Ya. Terima kasih, Ibu.

**900. SAKSI PIHAK TERKAIT: SINTA PERMANASARI [01:57:31]**

Dan mungkin (...)

**901. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:34]**

Pak Saripudin?

**902. SAKSI PIHAK TERKAIT: SARIPUDIN [01:57:37]**

Mohon izin, Yang Mulia.

**903. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:38]**

Ya.

**904. SAKSI PIHAK TERKAIT: SARIPUDIN [01:57:38]**

Saya Saripudin.

**905. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:39]**

Pak Saripudin, mengukudeta Pak Sahir itu. Karena Pak Sahir meninggalkan tempat jadi kudeta.

**906. SAKSI PIHAK TERKAIT: SARIPUDIN [01:57:47]**

Ya. Mohon izin, Yang Mulia.

**907. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:49]**

Silakan.

**908. SAKSI PIHAK TERKAIT: SARIPUDIN [01:57:50]**

Saya Saksi dari DPD, Ibu Silviana Murni.

**909. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:54]**

Oh, dari DPD.

**910. SAKSI PIHAK TERKAIT: SARIPUDIN [01:57:55]**

Ya. Saya ingin menjelaskan tentang tata caranya saja per ... me ... Yang Mulia. Dari awal sampai (...)

**911. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:00]**

Itu (...)

**912. SAKSI PIHAK TERKAIT: SARIPUDIN [01:58:00]**

Akhir (...)

**913. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:01]**

Prosedurnya, ya? (...)

**914. SAKSI PIHAK TERKAIT: SARIPUDIN [01:58:02]**

Ya.

**915. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:02]**

Prosedurnya (...)

**916. SAKSI PIHAK TERKAIT: SARIPUDIN [01:58:02]**

Prosedural (...)

**917. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:02]**

Ya.

**918. SAKSI PIHAK TERKAIT: SARIPUDIN [01:58:03]**

Dari awal sampai akhir, dari pembukaan sampai rekapitulasi, itu tidak ada masalah. Kalaupun ada masalah, itu langsung diselesaikan hari itu juga.

**919. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:12]**

Ya.

**920. SAKSI PIHAK TERKAIT: SARIPUDIN [01:58:13]**

Langsung diselesaikan hari itu juga dengan cara dicek C.Salinan dan cek ... pla ... C.Plano. Kalau kedua-duanya tidak ada kesinkronan, maka kita bongkar kotak suara.



**921. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:25]**

Oke.

**922. SAKSI PIHAK TERKAIT: SARIPUDIN [01:58:26]**

Dan disaksikan oleh PPS, Saksi, dan Panwas juga.

**923. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:30]**

Sekarang saya contoh, ya. Pak Saripudin punya C-1 nya TPS 1 Cilincing?

**924. SAKSI PIHAK TERKAIT: SARIPUDIN [01:58:43]**

Maaf, Yang Mulia.

**925. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:44]**

C-1, TPS 1 Cilincing, punya enggak?

**926. SAKSI PIHAK TERKAIT: SARIPUDIN [01:58:49]**

Punya, Ketua. Tapi kan sudah dikembalikan ke itunya, Ketua.

**927. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:53]**

Dikembalikan, ke mana?

**928. SAKSI PIHAK TERKAIT: SARIPUDIN [01:58:55]**

Ke yang ... apa ... ini saya (...)

**929. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:58]**

Bosnya?

**930. SAKSI PIHAK TERKAIT: SARIPUDIN [01:58:58]**

Ya, betul.

**931. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:59]**

Bu Silvia itu, kan? Ya, kan?

**932. SAKSI PIHAK TERKAIT: SARIPUDIN [01:59:02]**

Ya. Ya, Ketua.

**933. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:03]**

Ya, itu susahnya. Jadi Cilincing kalau mau, yang punya dan dijadikan bukti itu dari Bawaslu. Jadi kalau Bapak, Ibu kan, sudah enggak dibawa kan?

**934. SAKSI PIHAK TERKAIT: SARIPUDIN [01:59:15]**

Ya, Yang Mulia.

**935. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:16]**

Nah. Oleh karena itu, kita tadi berdasarkan keterangan Ahli Pak Putu, ya. Kita nanti cocok terakhir, kita cocokkan dengan Bawaslu. Jadi kalau menurut Bapak, seluruh prosedur rekapitulasi sudah dilakukan?

**936. SAKSI PIHAK TERKAIT: SARIPUDIN [01:59:30]**

Betul, Yang Mulia.

**937. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:30]**

Kalau ada selisih, di (...)

**938. SAKSI PIHAK TERKAIT: SARIPUDIN [01:59:32]**

Langsung diselesaikan (...)

**939. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:32]**

Selesaikan (...)

**940. SAKSI PIHAK TERKAIT: SARIPUDIN [01:59:32]**

Hari itu juga (...)

**941. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:33]**

Gitu?

**942. SAKSI PIHAK TERKAIT: SARIPUDIN [01:59:33]**

Dan la ... Sirekap langsung direvisi hari itu juga.

**943. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:38]**

Atas nama saksi mandat dari Bu Silvia, tanda tangan hasilnya?  
Untuk (...)

**944. SAKSI PIHAK TERKAIT: SARIPUDIN [01:59:43]**

Tanda tangan.

**945. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:44]**

Yang ditandatangani untuk DPD, ya?

**946. SAKSI PIHAK TERKAIT: SARIPUDIN [01:59:45]**

Ya, Yang Ketua.

**947. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:46]**

DPD (...)

**948. SAKSI PIHAK TERKAIT: SARIPUDIN [01:59:47]**

Tapi saya juga mengikuti seluruh (...)

**949. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:49]**

Oke, mengerti seluruh rangkaian (...)

**950. SAKSI PIHAK TERKAIT: SARIPUDIN [01:59:51]**

Rangkaian dari (...)

**951. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:51]**

Rekapitulasi (...)

**952. SAKSI PIHAK TERKAIT: SARIPUDIN [01:59:52]**

Dari capres, cawapres, sampai DPD (...)

**953. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:54]**

Ya, DPD.

**954. SAKSI PIHAK TERKAIT: SARIPUDIN [01:59:54]**

Ya, Ketua.

**955. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:55]**

Baik, ada lagi yang akan disampaikan? Cukup, ya?

**956. SAKSI PIHAK TERKAIT: SARIPUDIN [01:59:58]**

Ya, cukup Ketua, Yang Mulia.

**957. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:59]**

Baik, sekarang Bawaslu ini penting Bawaslu. Bawaslu coba dibuka buktinya. Kita mulai untuk sampel. TPS 1 Cilincing, TPS 1 Cilincing, itu dibuka. Perolehan suara yang dipunyai salinan ... C-1.Salinannya Bawaslu untuk Partai Demokrat, berapa?

**958. BAWASLU: SAKHROJI [02:00:33]**

TPS 1, ya, Mulia, ya?

**959. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:36]**

Ya. TPS 1 Cilincing.

**960. BAWASLU: SAKHROJI [02:00:39]**

Demokrat=10.

**961. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:40]**

10. NasDem?

**962. BAWASLU: SAKHROJI [02:00:41]**

20.

**963. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:42]**

20. Di Formulir D, sekarang dibuka!  
Termohon, Termohon yang Cilincing siapa? Pak Sudirman tadi?  
Atau Pak Arfah? Loh, sudah pada enggak ada? Pak Arfah? Pak Arfah?  
Oh, Pak Arfah. Pak Arfah, dibuka.

**964. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [02:01:08]**

Kami tidak bawa.

**965. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:10]**

D-1 bawa, enggak?

**966. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [02:01:11]**

C-1 tidak bawa, Yang Mulia.

**967. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:12]**

Yang bawa Kuasa Hukumnya (...)

**968. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [02:01:14]**

Ya. Yang (...)

**969. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:14]**

Bawa?

**970. SAKSI TERMOHON: M. ARFAH MADRIANTA [02:01:14]**

Cuma D.Hasil yang kami bawa.

**971. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:16]**

D.Hasil, bawa? Ya, kalau gitu, ya ... anu ... saja, Kuasa Hukumnya.

**972. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [02:01:23]**

Termuat di jawaban, Yang Mulia.

**973. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:25]**

Ya.

**974. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [02:01:25]**

Di tabel.

**975. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:27]**

D-1, TPS ... TPS 1?

**976. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [02:01:30]**

Ya, betul.

**977. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:31]**

Di formulir D.Hasil. Partai Demokrat berapa?

**978. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [02:01:35]**

10, Yang Mulia.

**979. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:37]**

Partai NasDem?

**980. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [02:01:38]**

73.

**981. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:39]**

Berarti beda kan, antara Bawaslu dengan Termohon? Ada kelebihan sesuai yang didalilkan oleh Pemohon=53 suara.

Jadi, C-1.Salinan yang dipunyai oleh Demokrat ... oleh Bawaslu, 20=NasDem. Ya, betul, ya?

**982. BAWASLU: SAKHROJI [02:02:00]**

Ya, memang data ini kita ambil selain dari Sirekap juga (...)

**983. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:04]**

Dari C-1.Salinan, kan? (...)

**984. BAWASLU: SAKHROJI [02:02:05]**

Dari salinan.  
Yang memang ini, mungkin ada perubahan yang disampaikan oleh KPU dalam proses.

**985. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:12]**

Makanya, nanti kita lihat di C-1 Plano. Sekarang contoh lagi, TPS 5 Sukapura, coba dibuka Bawaslu!

**986. BAWASLU: SAKHROJI [02:02:23]**

TPS 5.

**987. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:24]**

TPS 5 Sukapura.

**988. BAWASLU: SAKHROJI [02:02:25]**

Ya.

**989. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:28]**

Berapa perolehan suara Partai Demokrat?

**990. BAWASLU: SAKHROJI [02:02:31]**

34.

**991. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:33]**

34 atau 39?

**992. BAWASLU: SAKHROJI [02:02:35]**

Demokrat=34.

**993. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:38]**

Ha? 34 atau 39? Kita cocokkan.

**994. BAWASLU: SAKHROJI [02:02:42]**

NasDem yang 39.

**995. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:43]**

Ha?

**996. BAWASLU: SAKHROJI [02:02:44]**

NasDem=39.

**997. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:46]**

TPS 5 Sukapura?

**998. BAWASLU: SAKHROJI [02:02:48]**

Betul.

**999. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:50]**

39=Demokrat?

**1000. BAWASLU: SAKHROJI [02:02:52]**

Demokrat di sini 34 (...)

**1001. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:54]**

34 (...)

**1002. BAWASLU: SAKHROJI [02:02:54]**

NasDem=39.

**1003. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:54]**

NasDemnya?



**1004.BAWASLU: SAKHROJI [02:02:55]**

39.

**1005.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:56]**

Nasdem=39. Terus sekarang dibuka di sini TPS 5 Sukapura, berapa di D.Hasilnya Demokrat?

**1006.KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [02:03:06]**

TPS 5 Sukapura, Demokrat=34, Yang Mulia.

**1007.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:11]**

Untuk NasDemnya?

**1008.KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [02:03:13]**

Tercatat 42, Yang Mulia.

**1009.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:14]**

42, beda lagi kan? Contoh itu, Sukapura.

Sekarang yang terakhir Semper Barat, coba kita lihat. Ini gampang sekali kok, nyocokkan begini ini. TPS 216 Semper Barat. Untuk Partai Demokrat berapa? Bawaslu?

**1010.BAWASLU: SAKHROJI [02:03:40]**

5.

**1011.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:41]**

5. Untuk NasDem?

**1012.BAWASLU: SAKHROJI [02:03:43]**

5 juga.

**1013.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:44]**

5 juga. Sekarang D-1 yang dipunyai Termohon. Semper Barat, 216. Demokrat berapa? Oke. Cepat kita, tadi Bawaslu juga cepat itu, Semper Barat TPS 216? Ya, Samper Barat, 216? Demokrat berapa?

**1014.KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [02:04:28]**

Demokrat=5.

**1015.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:31]**

NasDem?

**1016.KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [02:04:33]**

Ya. NasDem=22.

**1017.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:35]**

Nah, beda lagi kan? Jadi ini sudah kita sandingkan ternyata memang antara C-1 ... apa ... salinan yang dipunyai oleh Bawaslu, dengan yang dipunyai Termohon di D-nya mengalami peningkatan ... penambahan, tidak konsisten. Kalau yang dipunyai anu, sekarang sebagai contoh punya Termohon. Termohon di Semper Barat, TPS 216. Coba berapa yang dipunyai Partai Demokrat?

**1018.KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAT [02:05:18]**

TPS 216, Yang Mulia.

**1019.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:19]**

216, Semper Barat?

**1020.KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAT [02:05:22]**

Demokrat kalau versi Pemohon, 5.

**1021.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:24]**

5?

**1022.KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [02:05:25]**

Ya.

**1023.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:26]**

NasDemnya?

**1024.KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAT [02:05:27]**

NasDemnya juga 5, Yang Mulia.

**1025.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:28]**

5.

**1026.KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAT [02:05:29]**

Ya. Kalau versi Termohon, sori, 22, Yang Mulia.

**1027.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:35]**

5 dan 22?

**1028.KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAT [02:05:37]**

Ya, 5 dan 22.

**1029.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:38]**

Demokratnya tetap 55, tapi NasDemnya (...)

**1030.KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAT [02:05:40]**

22.

**1031.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:41]**

Dari 5 berubah jadi 22?

**1032.KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAT [02:05:42]**

Ya. Ada selisih 17.

**1033.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:44]**

17. Ada selisih yang didalilkan ini, 17?

**1034.KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAT [02:05:48]**

Ya.

**1035.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:49]**

Jadi begitu, maka saya minta kesanggupan dari Termohon kapan bisa menghadirkan bukti plano, C-1.Plano dari seluruh locus yang dipersengketakan.

**1036.KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [02:06:10]**

Izin, Yang Mulia.

**1037.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:12]**

Ya.

**1038.KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [02:06:12]**

Kami tim Kuasa Hukum, karena harus berkoordinasi dengan KPU DKI dan Jakarta Utara.

**1039.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:16]**

Ya.

**1040.KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [02:06:17]**

Mohon waktu 3 hari ke depan kalau (...)

**1041.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:21]**

3 hari ke depan, ya?

**1042.KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [02:06:22]**

Ya.

**1043.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:23]**

Baik, 3 hari ke depan. Ini disaksikan seluruh ... Jadi kita begini, kita itu akan mengadakan rapat pada tanggal berapa ini? Kalendernya kok masih ... tanggal 30. Sekarang tanggal 30. Kalau 3 hari ke depan berarti Juni tanggal 4. Kalau Senin, hari Senin. Ini kan masih hari Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu 3 hari ke depan. Senin harus sudah ada.

Kalau tidak ada, putusan kita berarti kita akan meyakini yang mana nanti tinggal putusan.

**1044.SAKSI TERMOHON: DODY WIJAYA [02:07:05]**

Kalau diperkenankan, izin, Yang Mulia, 3 hari kerja, ya. Karena kami juga (...)

**1045.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:08]**

Tidak bisa, kita harus rapat ini. Nanti putusannya mulai tanggal 6, 7, sampai 10 (...)

**1046.SAKSI TERMOHON: DODY WIJAYA [02:07:13]**

Baik.

**1047.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:14]**

Sudah diputuskan, ya. Karena ada batasan penyelesaian sengketa (...)

**1048.SAKSI TERMOHON: DODY WIJAYA [02:07:18]**

Ya.

**1049.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:19]**

Ini 45 hari. Oh 30 hari. 30 hari harus sudah diputus. Jadi tanggal 10 itu sudah harus akhir diputus. Tanggal 6, 7 itu sudah diputus. Sehingga kita minta hari Senin, ya?

**1050.KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [02:07:33]**

Siap, Yang Mulia.

**1051.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:34]**

Senin pada, terakhir pada pukul 13.00 WIB, ya, 13.00 WIB. Soalnya untuk kita bahan rapat harus selesai, ya. Anda harus bekerja keras.

**1052.KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [02:07:44]**

Siap, Yang Mulia.

**1053.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:45]**

Kalau rasanya honornya kurang minta tambah honornya. Ya, kan? Ini dikasih pekerjaan tambahan oleh Hakim. Ya? Jadi, sekali lagi di dalam persidangan yang terbuka untuk umum diumumkan Pihak Termohon sanggup menghadirkan C-1 Plano dari locus yang dipersengketakan terakhir pada tanggal 3 Juni 2024, pada pukul 13.00 WIB diterima di Kepaniteraan di bawah, tidak ada persidangan lagi, jadi diterima di Kepaniteraan di bawah. Selewatnya itu dianggap tidak ada bukti, sehingga Mahkamah memutuskan dengan keyakinannya sendiri, ya. Sehingga itu yang bisa dilakukan. Ya, Kuasa Termohon, Pak siapa ini tadi saya baca, lupa namanya saya jadinya. Siapa Pak? Pak siapa?

**1054.KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [02:08:42]**

Pak Stefanus.

**1055.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:43]**

Pak Stefanus, oh Pak Stefanus, sudah disumpah juga sebagai advokat kok, ya harus anu. Jadi seluruh rangkaian persidangan sudah selesai, pembuktian.

**1056.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [02:08:53]**

Mohon ... mohon izin, Yang Mulia.

**1057.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:55]**

Dari mana? Oh dari Pihak Terkait apa?

**1058.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [02:08:57]**

Pihak Terkait, Yang Mulia.

**1059.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:58]**

He eh.

**1060.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [02:08:59]**

Baik, kami dari Pihak Terkait menyampaikan kami sangat menghormati keputusan Mahkamah.

**1061.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:04]**

Ya.

**1062.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [02:09:05]**

Namun ada satu hal yang kami ingin sampaikan supaya menjadi pertimbangan Mahkamah, Yang Mulia.

**1063.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:08]**

Apa? Silakan.

**1064.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [02:09:08]**

Kami menghadirkan saksi fakta, Saksi Mandat dari partai lain yang tidak ada konflik kepentingan (...)

**1065.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:14]**

Ya, itu pasti terang dicatat (...)

**1066.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [02:09:18]**

Baik. Siap (...)

**1067.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:19]**

Tadi kan saya tanya, sudah tanya saksi (...)

**1068.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [02:09:19]**

Baik, Yang Mulia (...)

**1069.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:20]**

Mandat, mana saja.

**1070.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [02:09:21]**

Bila diperkenankan saya ada dua pertanyaan tambahan, Yang Mulia.

Untuk memperjelas tadi satu kronologis tentang saksi dari Pemohon, apakah melakukan hal yang sama? Karena akan tidak fair, Yang Mulia. Apabila bahwa saksi dari partai lain itu sampai jam 02.00 pagi subuh juga melakukan komplain pada saat proses rekapitulasi ini juga menjadi bukti materiil (...)

**1071.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:41]**

Eenggak, itu semua kan dinilai oleh hakim.

**1072.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [02:09:44]**

Baik, Yang Mulia.

**1073.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:44]**

Apakah kesaksiannya objektif atau tidak objektif, itu nanti yang menilai hakim.

**1074.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [02:09:50]**

Baik, baik, Yang Mulia.

**1075.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:51]**

Objektivitas itu akan muncul bersamaan dengan bukti dari Termohon yang berupa C.Plano.

**1076.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [02:09:59]**

Baik.



**1077.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:00]**

Itu yang paling objektif.

**1078.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [02:10:02]**

Baik, Yang Mulia.

**1079.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:02]**

Barang mati yang di tempat rahasia. Buka saja harus rahasia.

**1080.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [02:10:07]**

Baik, Yang Mulia.

**1081.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:08]**

Ya, itu rahasia negara.

**1082.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [02:10:09]**

Baik, Yang Mulia.

**1083.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:10]**

Ya.

**1084.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [02:10:10]**

Jadi penekanan saja karena seolah-olah Partai Pemohon itu melakukan keberatan sesuai prosedur. Padahal sebenarnya sudah lewat. Karena ini kan menjadi perjanjian yang berjenjang, Yang Mulia.

**1085.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:21]**

Tapi keadilan itu diperoleh tidak ada lewat waktu. Lewat waktunya sesuai dengan undang-undang, 40 hari sidang di Mahkamah Konstitusi.

**1086.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [02:10:32]**

Baik.

**1087.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:32]**

Bawaslu juga sudah memberikan Keterangan yang berbeda, gitu lho, ya.

**1088.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [02:10:38]**

Baik, Yang Mulia.

**1089.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:38]**

Bawaslu kan aparat negara, objektif.

**1090.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [02:10:40]**

Baik, Yang Mulia.

**1091.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:41]**

Ternyata datanya juga berbeda.

**1092.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [02:10:44]**

Baik, kami mengerti.

**1093.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:45]**

Makanya kita mencari keadilan yang substantif berasal dari C.Plano, ya.

**1094.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [02:10:51]**

Baik, Yang Mulia. Kami mengerti dan sangat menghormati. Namun ini untuk menjadi catatan saja, Yang Mulia.

**1095.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:55]**

Sudah dicatat. Pasti seluruh rangkaian persidangan ini sudah dicatat dan itu terekam dengan baik, ya.

**1096.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [02:11:02]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis.

**1097.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:03]**

Terima kasih.

Pemohon mengajukan tambahan Bukti P-88, P-123, P-129, dan P-94. Betul?

**1098.KUASA HUKUM PEMOHON: MEHBOB [02:11:13]**

Betul, Yang Mulia.

**1099.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:31]**

Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Termohon menambahkan Bukti T-3 sampai dengan T-3G.  
Betul. Termohon. Termohon, kok kaget? Kok sudah enggak fokus?  
Bingung sampai hari Senin ini, ya.  
Perbaiki Bukti T-3 sampai dengan T-3G.

**1100.KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [02:11:38]**

Siap, Yang Mulia.

**1101.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:39]**

Betul, ya.  
Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Jadi, Pak Stefanus, jangan kaget. Pak Stefanus, kalau ada lemburan begitu minta tambahan sama Pak Dody itu lho. Ya, malah

beneran nanti bisa minta tambahan Pak Dody. Terserah, Pak Dody nyarinya gimana di APBN kan ada.

Baik.

**1102. BAWASLU: SAKHROJI [02:12:02]**

Mohon izin, Majelis.

**1103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:03]**

Apalagi?

**1104. BAWASLU: SAKHROJI [02:12:04]**

Nanti yang dihadirkan kotak suaranya atau hanya C.Plano-nya?

**1105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:08]**

Jadi begini, buktinya adalah C.Plano yang sudah difotokopi, kan enggak bisa itu dibawa ke sini. Masih harus, dibuka kotaknya, terus kemudian C.Hasil Plano-nya di-copy, copy-nya diserahkan ke sini, copy autentik yang sudah dileges itu, bukan kotaknya, ya.

**1106. BAWASLU: REKI PUTERA JAYA [02:12:40]**

Mohon izin, Yang Mulia.

**1107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:41]**

Ya.

**1108. BAWASLU: REKI PUTERA JAYA [02:12:42]**

Sekira pada saat pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh KPU, kami juga perlu untuk melakukan pengawasan?

**1109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:47]**

Oh, ya pasti.

**1110. BAWASLU: REKI PUTERA JAYA [02:12:48]**

Terima kasih.

**1111.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:49]**

Pembukaan kotak suara itu yang resmi menurut PKPU harus dihadiri oleh, satu adalah Bawaslu, kemudian kepolisian, itu wajib, ditambah nanti mengundang pihak-pihak partai politik.

Nah, di sini yang terutama adalah dari Demokrat dan NasDem, itu tapi partai politik yang lain juga boleh, termasuk ini tadi, Bapak-Ibu, ini juga diundang juga untuk hadir di situ, masih autentik atau tidak, gitu. Tapi hasil itu yang difotokopi, yang dibawa hanya untuk ke sini, tidak dibagikan pada beliau-beliau, itu rahasia negara, ya? Bawaslu, cukup?

Ya. Baik, jadi ini Perkara ini 09, tinggal menunggu putusan. Untuk bisa memutus, kita masih diperlukan bukti tambahan dari pihak Termohon yang kita minta, hari Senin terakhir tanggal 3, pukul 13.30 WIB, ya.

Pak Stefanus, jangan merasa sedih, malah mestinya merasa, merasa gembira, semangat (...)

**1112.KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [02:14:14]**

Semangat, Yang Mulia.

**1113.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:22]**

Karena Pak Dody, Pak Dody harus menyediakan tambahan, itu jangan sedih dong.

Nanti sidang putusannya, akan diucapkan pada tanggal 6, 7, 10, tapi giliran untuk perkara ini kapan, itu nanti menunggu panggilan secara resmi dari Kepaniteraan, ya.

**1114.KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [02:14:36]**

Baik.

**1115.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:37]**

Pemohon ada? Cukup? Termohon?

**1116.KUASA HUKUM PEMOHON: MEHBOB [02:14:40]**

Cukup, Yang Mulia.

**1117.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:41]**

Pak Stefanus, cukup? Bawaslu, cukup ya. Pihak Terkait, apalagi?

**1118.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [02:14:46]**

Mohon, mohon izin, Yang Mulia. Bukti tambahan kita, belum disahkan, Yang Mulia. Kita Pihak Terkait ada bukti tambahan yang diserahkan, hari ini juga dalam persidangan.

**1119.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:55]**

Pihak Terkait, mana Mbak Intan, ada enggak? Sebentar, sebentar. Bukti tambahannya berapa? PT berapa?

**1120.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [02:15:08]**

PT-4, Yang Mulia.

**1121.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:10]**

Hanya PT-4?

**1122.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [02:15:12]**

PT-4 saja, Yang Mulia. Itu berupa video tentang kejadian-kejadian yang tadi disebutkan oleh saksi, Yang Mulia.

**1123.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:18]**

Oke, video ya.

**1124.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [02:15:20]**

Betul, Yang Mulia.

**1125.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:21]**

P-4 saja, ya?

**1126.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [02:15:22]**

P-4 saja, Yang Mulia. PT-4, PT-4 Yang Mulia. Bukti Pihak Terkait Nomor 4.

**1127.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:28]**

Oke, Bukti PT-4, sebuah flashdisk berisikan video yang menggambarkan kejadian pada tanggal 6 Maret 2024.

**1128.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [02:15:37]**

Betul, betul Yang Mulia.

**1129.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:38]**

Ya. Sudah diverifikasi, disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Terima kasih.

**1130.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [02:15:42]**

Terima kasih Yang Mulia.

**1131.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:47]**

Baik. Dengan demikian, terima kasih pada Saksi, terima kasih pada semua Saksi Pihak Terkait. Terutama dari DPD ini, saya terima kasih, karena Saksinya dari DPD juga hadir, ya. Terima kasih, semoga semuanya sehat.

Terima kasih, waalaikumsalam wr. wb.  
sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.45 WIB**

Jakarta, 30 Mei 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

